



DIKTAT

Mata Kuliah

ISU-ISU GLOBAL MASA KINI

Pengajar

Ahmad Khoirul Umam, PhD

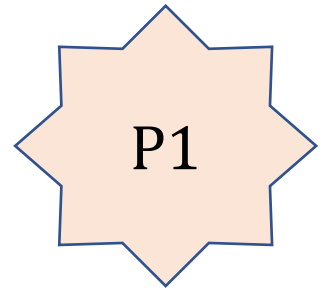
Semester Gasal 2020/2021

**Prodi Hubungan Internasional,
Fakultas Falsafah & Peradaban
Universitas Paramadina, Jakarta**

Daftar Isi

	Halaman
Kelas ke-1: Pengantar Isu-isu Global Masa Kini.....	3
Kelas ke-2: Isu Keamanan: Perang, Agresi Militer dan Sengketa Perbatasan.....	10
Kelas ke-3: Isu Keamanan: Senjata Nuklir dan & Senjata Biologi	14
Kelas ke-4: Isu Keamanan: Agama, Terorisme, Perang Melawan Jaringan Terorisme Global.....	21
Kelas ke-5: Isu Keamanan Non-konvensional: Keamanan Manusia, Keamanan Pangan, Keamanan Energi	28
Kelas ke-6: Isu sosial-ekonomi & politik: Rezim Anti-Korupsi di Dunia International	32
Kelas ke-7: Isu Ekonomi internasional: Perdagangan Bebas.....	37
Kelas ke-8: Ujian Tengah Semester.....	45
Kelas ke-9: Isu Ekonomi internasional: Krisis Finansial.....	46
Kelas ke-10: Isu Ekonomi global: Kerjasama Multilateral.....	56
Kelas ke-11: Isu Sosial Budaya: Perubahan Iklim.....	63
Kelas ke-12: Isu Sosial Budaya; Demokrasi dan HAM	71
Kelas ke-13: Isu Ekonomi internasional: Pembangunan Internasional.....	79
Kelas ke-14: Isu Sosial-Budaya: Identitas, Nasionalisme dan Konflik Etnik.....	83
Kelas ke-15: Tantangan Keamanan & Politik Internasional Masa Depan	89
Kelas ke-16: Ujian Akhir Semester.....	96

PENGANTAR ISU-ISU GLOBAL MASA KINI



DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta kemampuan analisa bagi mahasiswa mengenai isu-isu global masa kini yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Mahasiswa akan memperoleh gambaran yang luas mengenai teori, konsep, pola, aksi dan reaksi aktor-aktor dalam sistem politik internasional. Cakupan Ilmu Hubungan Internasional kini dirasakan kian berkembang pesat akibat munculnya beragam isu-isu global masa kini yang menjadi bagian dari wacana ilmu tersebut. Isu-isu yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, dibagi dalam tiga bagian besar: isu keamanan, isu ekonomi dan isu sosial budaya.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Agar mahasiswa memperoleh pemahaman tentang isu-isu global masa kini yang menjadi cakupan kajian studi Hubungan Internasional.
2. Agar mahasiswa memperoleh pemahaman tentang bagaimana mengontekstualisasikan isu-isu global masa kini ke dalam perspektif Hubungan Internasoional.

SILABUS PEMBELAJARAN

KELAS KE-	MATERI	DOSEN	METODE
1	Pengantar isu-isu Global Masa Kini	AKU	Online (zoom meeting)
2	Isu Keamanan: Perang, Agresi Militer dan Sengketa Perbatasan	AKU	Online (zoom meeting)
3	Isu Keamanan: Senjata Nuklir dan & Senjata Biologi	AKU	Online (zoom meeting)
4	Isu Keamanan: Agama, Terorisme, Perang Melawan Jaringan Terorisme Global	AKU	Online (zoom meeting)
5	Isu Keamanan Non-konvensional: Keamanan Manusia, Keamanan Pangan, Keamanan Energi	AKU	Online (zoom meeting)
6	Isu sosial-ekonomi & politik: Rezim Anti-Korupsi di Dunia International	AKU	Online (zoom meeting)
7	Isu Ekonomi internasional: Perdagangan Bebas	AKU	Online (zoom meeting)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)			
9	Isu Ekonomi internasional: Krisis Finansial	AKU	Online (zoom meeting)
10	Isu Ekonomi global: Kerjasama Multilateral	AKU	Online (zoom meeting)
11	Isu Sosial Budaya: Perubahan Iklim	AKU	Online (zoom meeting)
12	Isu Sosial Budaya; Demokrasi dan HAM	AKU	Online (zoom meeting)
13	Isu Ekonomi internasional: Pembangunan Internasional	AKU	Online (zoom meeting)
14	Isu Sosial-Budaya: Identitas, Nasionalisme dan Konflik Etnik	AKU	Online (zoom meeting)
15	Tantangan Keamanan & Politik Internasional Masa Depan	AKU	Online (zoom meeting)
16. Ujian Akhir Semester UAS: Keterangan: DR. AHMAD KHOIRUL UMAM (AKU)			

KETENTUAN KEHADIRAN KELAS

Metode Pembelajaran Daring

- a) *Asynchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform eLearning* Paramadina; atau Whatsapp Group
- b) *Synchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform* Zoom

Tugas-tugas:

- a) Sebelum pertemuan kelas: Membaca bahan perkuliahan terkait materi yang akan disampaikan pada saat kelas sebelumnya
- b) Nilai perkuliahan: Tugas terstruktur pada pertemuan kelas yang telah ditetapkan atau satu makalah ilmiah

TATA CARA PENILAIAN

Bobot Penilaian:

1. Rata-rata nilai yang diberikan Dosen selama perkuliahan adalah:
 - Keaktifan mahasiswa dan hasil tugas-tugas perkuliahan (20%)
 - Nilai Ujian Tengah Semester atau UTS (40%)
 - Nilai Ujian Akhir Semester atau UAS (40%)
 - Nilai akhir merupakan kewenangan Dosen untuk menentukannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Apabila Dosen menilai perlu melakukan penyesuaian pembobotan nilai akhir dengan pertimbangan menjunjung tinggi kepentingan mahasiswa maka Dosen berhak melakukannya.
 - Hal-hal yang disepakati dalam kontrak ini dapat ditinjau kembali antara dosen dan mahasiswa di kemudian hari. Perubahan isi kontrak perkuliahan akan dilaksanakan dengan pemberitahuan.

Kriteria Penilaian:

Nilai Interval

A	≥ 85
-A	80-84
B+	75-79
B	70-74
-B	65-69
C+	60-64
C	$\leq 55-59$
D	Indisipliner

Kontak

Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

ahmad.khoirul@paramadina.ac.id

Akses materi kuliah dan panduan perkuliahan:

<http://elearning.paramadina.ac.id>

Peraturan selama Penyelenggaraan Praktikum Daring

Asynchronous

- Dosen berhak menentukan absensi sebagai penanda kehadiran berdasarkan pengisian langsung di *MyParmad* ataupun melalui bukti pengumpulan tugas.
- Pada pengisian langsung, Dosen akan melakukan pengisian BAP Perkuliahan *Online* di *MyParmad* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati
- Jadwal perkuliahan pengganti yang telah disepakati Dosen dan Mahasiswa akan disesuaikan ketika Dosen menginformasikan kepada mahasiswa dan Bagian Akademik Universitas
- Pada pengisian kehadiran berdasarkan bukti pengumpulan tugas, Dosen akan melakukan koordinasi dengan Tim Akademik Program Studi untuk pengisian BAP maupun absensi mahasiswa.

Synchronous

- Dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan metode *synchronous*, pengisian BAP perkuliahan *Online* di *MyParmad* baru akan dilakukan Dosen ketika perkuliahan selesai.
- Selama perkuliahan berlangsung, absensi dengan Google Form akan disebarkan dan mahasiswa wajib mengisi dengan melampirkan bukti foto mengikuti perkuliahan *online*.
- Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus melakukan *mute audio* dan Dosen akan meminta untuk mengaktifkan audio apabila diperlukan.
- Selama perkuliahan berlangsung, sewaktu-waktu Dosen dapat meminta untuk mengaktifkan fitur video dan mahasiswa harus siap.

TUGAS PERKULIAHAN 1

Capaian Belajar :

Setelah menyelesaikan kelas pertama ini mahasiswa dapat memahami konteks mata kuliah Isu-isu Global Masa Kini, dalam konteks kajian studi Hubungan Internasional.

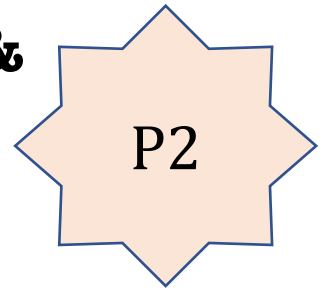
Cakupan Pemahaman

- Penjelasan SAP
- Penjelasan metode perkuliahan
- Perumusan aturan perkuliahan
- Penjelasan komponen penilaian, tugas, dan lainnya.
- Pengenalan isu-isu global masa kini.
- Isu-isu keamanan, ekonomi-politik dan sosial-kemasyarakatan
- Konteks isu-isu global dalam ekonomi-politik internasional

TUGAS UNTUK PERKUALIAHAN SELANJUTNYA

- Mahasiswa secara berkelompok melakukan telaah literatur tentang peran politik Islam dan hubungannya dengan teori hubungan internasional
- Setelah menemukan artikel-artikel mengenai hal tersebut, diskusikan dan susun *summary* tentang peran Islam dalam geo-ekonomi politik global kontemporer.
- *Summary* disajikan dalam bentuk *power point* dan dikumpulkan kepada Dosen

PERANG, AGRESI MILITER & SENGKETA PERBATASAN



CAPAIAN BELAJAR

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan secara umum mengenai isu keamanan: Perang, Agresi Militer dan Sengketa Perbatasan.

PERANG, AGRESI MILITER & SENGKETA PERBATASAN

Isu keamanan merupakan isu yang sangat penting bagi semua negara di dunia. Keamanan menjadi faktor utama dalam memastikan kelangsungan hidup suatu negara dan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keamanan global semakin kompleks dengan munculnya berbagai konflik dan sengketa perbatasan yang dapat memicu perang dan agresi militer antar negara.

Perang dan agresi militer merupakan fenomena yang telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Perang merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu negara atau kelompok negara terhadap negara atau kelompok negara lainnya. Perang dapat dipicu oleh berbagai hal seperti konflik ideologi, kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam sejarah dunia, perang sudah banyak terjadi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan fisik dan ekonomi.

Salah satu perang yang terkenal dalam sejarah dunia adalah Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914-1918 dan melibatkan kekuatan-kekuatan besar di Eropa seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan

Rusia. Perang Dunia I terjadi karena adanya konflik kepentingan di antara negara-negara tersebut, terutama terkait dengan pengaruh dan wilayah kekuasaan. Perang ini menyebabkan korban jiwa yang sangat besar dan menimbulkan kerusakan ekonomi yang besar di seluruh dunia.

Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939-1945 dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Perang ini terjadi karena adanya ambisi kekuasaan dari Jerman Nazi yang ingin menguasai Eropa dan Asia. Perang ini juga menyebabkan korban jiwa yang sangat besar dan kerusakan ekonomi yang parah di seluruh dunia.

Di masa kini, perang masih terjadi di beberapa wilayah di dunia seperti di Suriah dan Yaman. Perang ini terjadi karena adanya konflik antara kelompok-kelompok militan yang ingin menguasai wilayah tersebut. Perang ini menyebabkan korban jiwa yang sangat besar dan mengakibatkan kerusakan fisik dan ekonomi yang parah di wilayah tersebut.

Agresi militer adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lainnya tanpa alasan yang jelas dan sah. Agresi militer dapat dipicu oleh berbagai hal seperti ambisi kekuasaan, konflik perbatasan, dan sebagainya. Agresi militer dapat memicu terjadinya perang dan konflik antara negara-negara yang terlibat.

Sementara itu, sengketa perbatasan terjadi ketika dua negara atau lebih memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap wilayah yang sama. Sengketa perbatasan dapat dipicu oleh berbagai hal seperti sejarah wilayah tersebut, faktor etnis, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Sengketa perbatasan dapat menjadi sumber konflik antara negara-negara yang terlibat dan memicu terjadinya perang dan agresi militer.

Faktor-faktor Penyebab Perang antara lain; 1). Ambisi Kekuasaan. Salah satu faktor penyebab perang adalah ambisi kekuasaan. Kekuasaan adalah faktor yang sangat penting bagi negara-negara di dunia. Negara-

negara yang memiliki kekuasaan yang besar seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam dunia internasional. Negara-negara yang memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan besar seringkali melakukan tindakan-tindakan agresif untuk mencapai tujuan tersebut.

2). Konflik Ideologi. Konflik ideologi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perang. Konflik ideologi terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan atau keyakinan antara negara atau kelompok negara yang dapat menyebabkan konflik. Contohnya adalah Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara sistem pemerintahan komunisme dan kapitalisme.

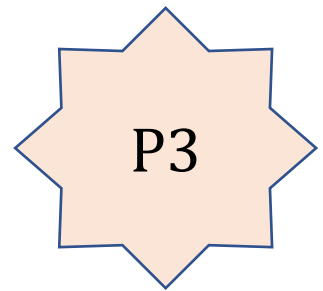
3). Kepentingan Ekonomi. Kepentingan ekonomi juga menjadi faktor penyebab terjadinya perang. Perang dapat terjadi jika suatu negara ingin menguasai sumber daya alam atau wilayah perekonomian dari negara lain. Contohnya adalah invasi Irak oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 yang terjadi karena adanya kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat di wilayah tersebut.

4). Kepentingan Politik. Kepentingan politik juga menjadi faktor penyebab terjadinya perang. Perang dapat terjadi jika suatu negara ingin menguasai wilayah atau pengaruh politik dari negara lain. Contohnya adalah Perang Dunia II yang terjadi karena adanya ambisi kekuasaan dari Jerman Nazi yang ingin menguasai Eropa dan juga dunia. Selanjutnya, silakan baca sumber-sumber referensi berikut ini:

1. Mearsheimer, John J. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Co., 2001.
2. Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.

3. Snyder, Jack. *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991.
4. Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976.
5. Sipress, Jeffrey. *The Fatal Strain: On the Trail of Avian Flu and the Coming Pandemic*. New York: Penguin Press, 2009.
6. Neack, Laura, Jeanne A. K. Hey, and Patrick J. Haney, eds. *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
7. Vasquez, John A. *The War Puzzle*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
8. Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
9. Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill, 1979.
10. Blainey, Geoffrey. *The Causes of War*. New York: Free Press, 1973.

PROLIFERASI SENJATA NUKLIR DAN SENJATA BIOLOGIS



CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa mampu memahami ancaman penggunaan senjata nuklir dan dampak positif dan negatifnya bagi manusia dan lingkungan.

SENJATA NUKLIR & SENJATA BIOLOGIS

Senjata nuklir merupakan jenis senjata yang menggunakan energi dari reaksi nuklir untuk menghasilkan ledakan dahsyat. Penggunaan senjata nuklir pertama kali terjadi pada akhir Perang Dunia II di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sejak saat itu, penggunaan dan pengembangan senjata nuklir menjadi salah satu isu global yang sangat sensitif.

Setelah senjata nuklir dikembangkan, Amerika Serikat melakukan uji coba pertama pada tanggal 16 Juli 1945. Uji coba ini dilakukan di Alamogordo, New Mexico dan disebut dengan nama "Trinity". Ledakan nuklir yang dihasilkan oleh uji coba ini setara dengan 20.000 ton TNT dan menandai dimulainya era senjata nuklir. Namun, ternyata uji coba senjata nuklir pertama di Alamogordo, New Mexico tersebut membuka babak baru dalam sejarah perang dunia, yang menyebabkan perubahan besar dalam taktik militer, diplomasi internasional, dan pengaruh global.

Pada awalnya, senjata nuklir dikembangkan oleh AS dalam rangka memenangkan perlombaan senjata dengan Jerman Nazi selama Perang

Dunia II. Para ilmuwan AS yang tergabung dalam "Manhattan Project" berhasil mengembangkan bom atom pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico, AS. Ledakan tersebut dikenal sebagai *Trinity test* dan memiliki kekuatan sekitar 20 kiloton. Uji coba ini berhasil dan membuka jalan untuk penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Selanjutnya, Amerika Serikat segera menggunakan bom atom tersebut untuk menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 6 dan 9 Agustus 1945, yang mengakibatkan kematian sekitar 200.000 orang.

Setelah Perang Dunia II berakhir, pengembangan senjata nuklir terus berlanjut di AS dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut bersaing dalam mengembangkan senjata nuklir yang lebih canggih dan lebih kuat. Pada tahun 1949, Uni Soviet menguji coba senjata nuklir pertamanya, yang disebut RDS-1. Kemudian, AS mengembangkan senjata nuklir yang lebih kuat, seperti bom hidrogen pada tahun 1952.

Setelah perang dunia II berakhir, Amerika Serikat mulai melakukan uji coba senjata nuklir secara teratur. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan banyak uji coba senjata nuklir. Uni Soviet melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada Agustus 1949. Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada 1 November 1952 di Enewetak, Kepulauan Marshall. Uji coba ini dikenal sebagai Ivy Mike dan memiliki kekuatan sekitar 10 megaton, lebih dari 500 kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima.

Selama tahun 1950-an dan 1960-an, Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir di berbagai tempat di dunia, termasuk di Nevada, Kepulauan Marshall, dan Alaska. Uni Soviet juga melakukan uji coba senjata nuklir di Siberia, Kazahstan, dan Samudra Arktik. Uji coba senjata nuklir juga dilakukan oleh Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China. Uni Soviet melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada tahun 1949 di Kazakhstan. Inggris

melakukan uji coba pertamanya pada tahun 1952 di Kepulauan Marshall. Selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China juga mengembangkan senjata nuklir dan melakukan uji coba.

Uji coba senjata nuklir memiliki dampak yang sangat besar pada lingkungan. Dampak utamanya adalah radiasi yang dihasilkan dari ledakan nuklir. Radiasi ini dapat membunuh atau merusak sel-sel hidup dan mengganggu proses biologis di dalam tubuh. Dalam uji coba senjata nuklir yang dilakukan di darat, uji coba senjata nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang mencemari tanah dan air di sekitarnya. Limbah radioaktif ini terdiri dari bahan-bahan berbahaya seperti plutonium dan uranium yang dapat menyebabkan kanker dan mutasi genetik pada manusia dan hewan.

SENJATA BIOLOGIS

Senjata biologis, seperti yang kita ketahui, adalah salah satu senjata paling mematikan dan menakutkan di dunia. Senjata biologis digunakan untuk menyerang sasaran dengan menggunakan agen biologis, seperti bakteri, virus, dan jamur. Senjata ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia dan hewan dalam waktu yang relatif singkat, dan mampu menyebabkan kematian massal.

Meskipun senjata biologis telah ada sejak zaman dahulu kala, penggunaannya dalam perang modern pasca Perang Dunia II telah menjadi topik yang sangat kontroversial. Berikut adalah sejarah penggunaan senjata biologis dalam perang modern pasca Perang Dunia II dan dampaknya:

Pada awalnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet menganggap senjata biologis sebagai salah satu senjata yang paling mematikan dan berbahaya, namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai mengambil jalan yang berbeda. Pada tahun 1969, Amerika Serikat menandatangani Konvensi

Senjata Biologis (BWC), yang melarang penggunaan, produksi, dan pengembangan senjata biologis.

Namun, Uni Soviet tidak menandatangani BWC dan melanjutkan pengembangan senjata biologis dengan sangat agresif. Pada tahun 1979, Uni Soviet dituduh menggunakan senjata biologis untuk membunuh warga Afghanistan dan memicu wabah anthrax di sana.

Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam pengembangan senjata biologis. Keduanya membangun fasilitas rahasia di seluruh dunia untuk mengembangkan agen biologis yang mematikan.

Pada tahun 1991, Uni Soviet setuju untuk menghentikan program senjata biologisnya dan menandatangani Protokol Tambahan BWC, yang melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata biologis. Namun, dugaan penggunaan senjata biologis oleh Irak selama Perang Teluk Pertama pada tahun yang sama menunjukkan bahwa ancaman senjata biologis masih nyata.

Penggunaan senjata biologis dalam perang modern pasca Perang Dunia II memiliki dampak yang sangat besar, terutama pada manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak dari penggunaan senjata biologis:

1. Kematian Massal. Penggunaan senjata biologis dapat menyebabkan kematian massal dan mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang relatif singkat. Contoh penggunaan senjata biologis yang paling terkenal adalah serangan sarin di Tokyo pada tahun 1995, yang menewaskan 12 orang dan melukai ribuan orang lainnya.
2. Penyebaran Penyakit. Senjata biologis dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah. Hal ini dapat menyebabkan wabah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit untuk dikendalikan. Ketika senjata biologis

dilepaskan ke udara atau lingkungan, agen biologisnya dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah melalui udara atau air. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran penyakit yang sangat cepat dan luas, sehingga sulit untuk diatasi.

3. Kerusakan Lingkungan. Senjata biologis juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Ketika agen biologis dilepaskan ke lingkungan, dapat menyebabkan kematian massal pada tumbuhan dan hewan liar, mengganggu ekosistem, dan merusak sumber daya alam.
4. Efek Psikologis. Penggunaan senjata biologis dapat menyebabkan efek psikologis yang sangat besar pada manusia. Efek ini dapat termasuk rasa takut, cemas, dan kecemasan yang berkelanjutan. Dalam kasus serangan bioterorisme, efek psikologis ini dapat sangat merusak dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk waktu yang lama.
5. Dampak Ekonomi. Penggunaan senjata biologis dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Serangan bioterorisme dapat mengganggu ekonomi secara luas, mengganggu kegiatan bisnis dan wisata, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
6. Penggunaan senjata biologis dalam perang modern pasca Perang Dunia II memiliki dampak yang sangat besar pada manusia dan lingkungan. Senjata biologis dapat menyebabkan kematian massal, penyebaran penyakit, kerusakan lingkungan, efek psikologis, dan dampak ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan senjata biologis dan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi ancaman senjata biologis. Melalui kerja sama internasional dan upaya yang terus-menerus, mungkin kita dapat mencegah penggunaan senjata biologis dan menjaga dunia menjadi

tempat yang aman bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, silakan baca dan cermati sejumlah literatur berikut ini:

1. Tucker, J. B. (2012). The biological weapons convention: a failed disarmament regime. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 68(6), 1-9.
2. Koblenz, G. D. (2013). *Living weapons: Biological warfare and international security*. Cornell University Press.
3. Wheelis, M. (2002). Biological warfare at the turn of the century. *Emerging infectious diseases*, 8(3), 225-233.
4. Zilinskas, R. A. (2007). Iraq's biological weapons: the past as future?. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 100(3), 130-133.
5. Guillemin, J. (2005). *Biological weapons: From the invention of state-sponsored programs to contemporary bioterrorism*. Columbia University Press.
6. "U.S. Nuclear Testing Program." National Nuclear Security Administration. <https://www.energy.gov/nnsa/us-nuclear-testing-program>
7. "The Environmental Effects of Nuclear Weapons Testing." Arms Control Association.
<https://www.armscontrol.org/factsheets/environmental-effects-nuclear-weapons-testing>
8. "Nuclear Testing and Its Long-Term Effects on Human Health and the Environment." Union of Concerned Scientists.
<https://www.ucsusa.org/resources/nuclear-testing-and-its-long-term-effects-human-health-and-environment>

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

1. Masing-masing mahasiswa melakukan review atas materi artikel yang telah di-*share*
2. Kumpulkan laporan dalam bentuk docs dan presentasi singkat dalam bentuk ppt ke ahmad.khoirul@paramadina.ac.id
3. Dalam pertemuan kelas selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil *review* artikel secara singkat dengan waktu per kelompok adalah 10 menit (presentasi dan Q&A).
4. Setiap kelompok dapat memperkaya paper atau bahan presentasinya dengan sumber-sumber lain yang relevan.

TERORISME, *GLOBAL WAR ON TERROR* & BANGKITNYA TERORISME BERBASIS AGAMA



P4

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami sejarah perkembangan isu terorisme dan respon dunia terhadap fenomena tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang perkembangan isu terorisme mutakhir, dengan studi kasus kemunculan ISIS

SEL-SEL JARINGAN TERORISME INTERNASIONAL

Sel-sel jaringan terorisme internasional telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia pada beberapa dekade terakhir. Kelompok-kelompok teroris ini menggunakan teknologi modern dan jaringan yang kompleks untuk mengembangkan strategi dan rencana untuk melakukan serangan yang merusak dan mematikan.

Sel-sel jaringan terorisme internasional adalah kelompok-kelompok teroris yang memiliki jaringan yang kompleks dan memiliki kemampuan untuk beroperasi di tingkat internasional. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki tujuan politik atau ideologis yang mereka percayai, dan mereka menggunakan kekerasan dan taktik terorisme untuk mencapai tujuan mereka. Sel-sel ini terdiri dari individu-individu yang terlatih secara militan dan terbiasa dalam mengoperasikan senjata, peralatan komunikasi, dan teknologi modern.

Sel-sel jaringan terorisme internasional memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok-kelompok teroris lainnya. Beberapa karakteristik ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur Hierarkis. Sel-sel jaringan terorisme internasional biasanya memiliki struktur yang hierarkis. Ini berarti bahwa mereka memiliki pemimpin yang berada di puncak struktur, dan bawahan yang melaksanakan tugas dan perintah dari pemimpin. Struktur hierarkis ini memungkinkan kelompok untuk mengoordinasikan tindakan mereka dan menjalankan strategi dengan lebih efektif.
2. Teknologi Modern. Sel-sel jaringan terorisme internasional menggunakan teknologi modern untuk mengembangkan strategi dan melakukan serangan. Mereka menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi dan menyebarkan propaganda, dan mereka menggunakan teknologi canggih seperti drone dan senjata api yang diproduksi secara massal.
3. Jaringan Internasional. Sel-sel jaringan terorisme internasional memiliki jaringan yang sangat kompleks dan meluas di tingkat internasional. Mereka beroperasi di banyak negara dan memiliki anggota dari berbagai negara yang berbeda. Ini memungkinkan kelompok untuk menghindari pengawasan dan memperoleh dukungan dari berbagai sumber.

Sel-sel jaringan terorisme internasional biasanya memiliki tujuan politik atau ideologis yang kuat. Mereka percaya bahwa tindakan kekerasan dan terorisme adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka siap melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Sel-sel jaringan terorisme internasional telah memiliki dampak yang signifikan pada keamanan dunia.

Serangan teroris yang dilakukan oleh sel-sel jaringan terorisme internasional juga dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Serangan-serangan ini dapat mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan properti, yang pada gilirannya dapat mengganggu produksi dan perdagangan. Selain itu, serangan teroris juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara masyarakat, yang dapat mempengaruhi konsumsi dan investasi.

Sel-sel jaringan terorisme internasional dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Mereka dapat melakukan serangan terhadap target-target strategis seperti gedung pemerintahan, instalasi militer, atau infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik atau fasilitas pengolahan air. Serangan seperti itu dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi pemerintahan dan mempengaruhi kemampuan negara untuk melindungi warga negaranya.

Serangan teroris yang dilakukan oleh sel-sel jaringan terorisme internasional juga dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di antara masyarakat. Serangan seperti itu dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku, dan dapat mengubah cara orang melihat dunia.

ANCAMAN JARINGAN ALQAEDA, JAMAAH ISLAMIYAH & ISIS

Sel-sel jaringan terorisme Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan ISIS telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia pada beberapa dekade terakhir. Kelompok-kelompok teroris ini menggunakan teknologi modern dan jaringan yang kompleks untuk mengembangkan strategi dan rencana untuk melakukan serangan yang merusak dan mematikan.

Al-Qaeda adalah kelompok teroris yang didirikan pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dan beberapa pemimpin teroris lainnya. Al-Qaeda

memiliki jaringan yang luas di seluruh dunia dan telah melakukan serangan teroris di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, dan Indonesia. Al-Qaeda memperjuangkan ideologi Islamisme dan memandang Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai musuh Islam.

Al-Qaeda terkenal karena serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang mengakibatkan hampir 3.000 orang tewas. Selain itu, Al-Qaeda juga bertanggung jawab atas serangan bom di kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Meskipun Osama bin Laden tewas pada tahun 2011, Al-Qaeda masih aktif dan terus melakukan serangan teroris di seluruh dunia.

Selanjutnya, Jamaah Islamiyah adalah kelompok teroris yang didirikan pada tahun 1993 di Indonesia oleh Abu Bakar Baasyir dan beberapa pemimpin teroris lainnya. Jamaah Islamiyah adalah kelompok teroris yang memperjuangkan ideologi Islamisme dan memandang Indonesia sebagai target penting karena dianggap sebagai negara yang tidak cukup mengikuti ajaran Islam.

Jamaah Islamiyah dikenal karena serangan bom di Bali pada tahun 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Selain itu, kelompok ini juga bertanggung jawab atas serangan-serangan teroris di Indonesia, termasuk serangan di Jakarta pada tahun 2003 dan serangan di Bali pada tahun 2005.

Setelah kejadian serangan di Bali, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memerangi Jamaah Islamiyah. Pada tahun 2011, Abu Bakar Baasyir ditangkap dan dipenjara karena terlibat dalam serangan teroris.

Terakhir, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) adalah kelompok teroris yang didirikan pada tahun 2013 oleh Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS adalah kelompok teroris yang memperjuangkan ideologi Islamisme dan memandang Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai musuh Islam.

Kelompok ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang mencakup wilayah Irak, Suriah, dan negara-negara tetangga.

ISIS dikenal karena kekejaman mereka dan sering kali menggunakan taktik yang brutal dalam serangan mereka, termasuk pemenggalan kepala dan pengeboman. Selain itu, ISIS juga melakukan pengambilalihan wilayah-wilayah di Irak dan Suriah dan menguasai mesin pemotong kepala yang dijuluki "Jihadi John" yang dikenal karena aksinya memenggal kepala sandera-sandera Barat yang ditawan oleh ISIS. Meskipun ISIS telah mengalami kekalahan militer di wilayah mereka di Irak dan Suriah, kelompok teroris ini masih aktif di seluruh dunia dan sering melakukan serangan teroris di negara-negara seperti Inggris dan Prancis.

Dengan demikian, sel-sel jaringan terorisme Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan ISIS telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia pada beberapa dekade terakhir. Kelompok-kelompok teroris ini memperjuangkan ideologi Islamisme dan menggunakan teknologi modern serta jaringan yang kompleks untuk merencanakan serangan teroris yang merusak dan mematikan.

Dampak dari kegiatan mereka sangat besar, termasuk tewasnya ratusan bahkan ribuan orang dalam satu serangan. Serangan-serangan teroris ini juga mengakibatkan kerugian material yang besar dan mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, kelompok-kelompok teroris ini juga menyebabkan pergeseran kebijakan dan meningkatnya pengawasan keamanan di seluruh dunia.

Upaya untuk memerangi kelompok-kelompok teroris ini telah dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sel-sel jaringan terorisme Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan ISIS telah menjadi tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia, dan perjuangan untuk memerangi terorisme harus terus dilakukan. Dalam memerangi terorisme,

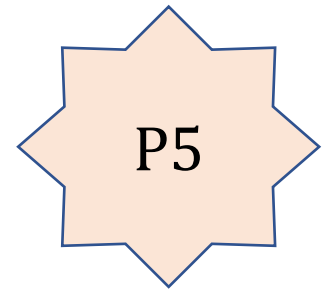
kerjasama antar negara dalam hal intelijen, keamanan dan diplomatik akan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya serangan-serangan teroris yang mematikan.

Sel-sel jaringan terorisme internasional telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia pada beberapa dekade terakhir. Kelompok-kelompok teroris ini menggunakan teknologi modern dan jaringan yang kompleks untuk mengembangkan strategi dan rencana untuk melakukan serangan yang merusak dan mematikan. Sel-sel ini terdiri dari individu-individu yang terlatih secara militan dan terbiasa dalam mengoperasikan senjata, peralatan komunikasi, dan teknologi modern. Dampak dari serangan-serangan yang dilakukan oleh sel-sel jaringan terorisme internasional sangat besar, termasuk kematian dan cedera pada banyak orang, gangguan pada ekonomi, gangguan pada keamanan nasional, dan kekhawatiran dan ketakutan di antara masyarakat. Upaya untuk memerangi sel-sel jaringan terorisme internasional harus terus dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia dengan cara yang efektif dan terkoordinasi.

1. Jones, S. G. (2019). The evolution of terrorist cells: A complex adaptive systems perspective. *Studies in Conflict & Terrorism*, 42(1), 47-63.
2. Gunaratna, R. (2015). *Inside Al Qaeda: Global network of terror*. Columbia University Press.
3. Hoffman, B. (2018). *Inside terrorism*. Columbia University Press.
4. United Nations. (2018). *Global Counter-Terrorism Strategy*.
5. Institute for Economics & Peace. (2021). *Global Terrorism Index*.
6. Bakker, E. (2006). *Jihadi terrorists in Europe: Their characteristics and the circumstances in which they joined the jihad: An exploratory study*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.

7. Bergen, P. (2011). *The longest war: The enduring conflict between America and al-Qaeda*. New York: Free Press.
8. Gunaratna, R. (2002). *Inside Al Qaeda: Global network of terror*. New York: Columbia University Press.
9. Horgan, J. (2005). *The psychology of terrorism*. London: Routledge.
10. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2019). *Global Terrorism Database*. Retrieved from <https://www.start.umd.edu/gtd/>
11. Neumann, P. R. (2015). *ISIS: The digital caliphate*. London: Hurst Publishers.
12. United Nations Security Council. (2019). *Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 2368 (2017) and 2451 (2018) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities*. Retrieved from https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/05/S_2019_373_E.pdf
13. Van Dijk, R. (2012). *The terrorist threat in Indonesia: Past, present, and future*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

KEAMANAN NON-KONVENSIONAL: *HUMAN SECURITY, FOOD SECURITY, ENERGY SECURITY*



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan berbagai bentuk isu keamanan non militer khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dimana manusia hidup. Hal ini juga mencakup keamanan pangan dan keamanan energi.

KEAMANAN PANGAN & ENERGI

Ketersediaan pangan dan energi menjadi isu utama dalam politik internasional saat ini. Keduanya menjadi isu yang sangat penting karena mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung dan menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Karena itu, tantangan keamanan pangan dan keamanan energi menjadi isu global yang perlu diatasi oleh masyarakat internasional.

Keamanan pangan adalah ketahanan dan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk di dunia. Namun, tantangan keamanan pangan semakin besar karena populasi dunia terus meningkat, sementara lahan pertanian dan sumber daya air yang tersedia semakin terbatas. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi ancaman bagi produksi pangan di seluruh dunia.

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 690 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Angka ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya, terutama karena dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk situasi ekonomi dan ketersediaan pangan di banyak negara.

Di sisi lain, keamanan pangan juga menjadi tantangan global dalam hal keamanan nasional. Negara-negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik mereka, rentan terhadap konflik dan tidak stabil. Hal ini terbukti dari adanya krisis pangan dan kelaparan yang terjadi di beberapa negara seperti Somalia, Yaman, dan Sudan Selatan yang akhirnya memicu konflik internal dan merusak stabilitas regional.

Sumber daya energi merupakan komponen penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Namun, tantangan keamanan energi semakin besar karena sumber daya energi yang terbatas, meningkatnya permintaan energi global, dan masalah lingkungan seperti emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2020, sekitar 789 juta orang di dunia tidak memiliki akses ke listrik. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang, di mana akses ke energi masih sangat terbatas. Di sisi lain, negara-negara yang bergantung pada sumber daya energi tertentu, seperti minyak atau gas, rentan terhadap fluktuasi harga yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Selain itu, penggunaan sumber daya energi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim dan polusi udara, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa depan.

Mengatasi tantangan keamanan pangan dan energi membutuhkan upaya yang besar dari masyarakat internasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan dan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan pertanian organik dan ramah lingkungan, membangun infrastruktur energi yang bersih dan terbarukan, serta meningkatkan akses ke teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

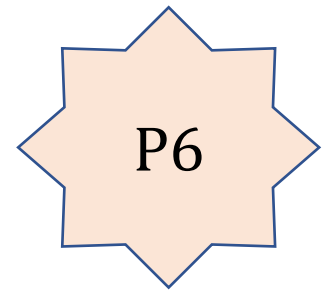
Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam mengatasi tantangan keamanan pangan dan energi. Negara-negara dapat bekerja sama dalam mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi pangan dan energi, serta berbagi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Untuk pemahaman selanjutnya, silakan baca referensi berikut ini:

1. FAO. (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. Rome: FAO.
2. International Energy Agency. (2020). *Energy Access Outlook 2020*. Paris: IEA.
3. United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
4. World Bank. (2021). *World Development Indicators 2021*. Washington, DC: World Bank.
5. World Health Organization. (2016). *Preventing Disease through Healthy Environments: A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks*. Geneva: WHO.

TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA

- Mahasiswa secara berkelompok menentukan poin-poin isu keamanan non-konvensional dan berikan contohnya, khususnya terkait dengan keamanan pangan dan keamanan energi
- Selanjutnya, poin-poin tersebut akan didiskusikan dalam kelas selanjutnya.

REZIM ANTI-KORUPSI DI DUNIA INTERNASIONAL



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan tentang kondisi dan tantangan tata kelola pemerintahan dan juga agenda anti-korupsi di dunia internasional.

REZIM ANTI-KORUPSI & GOOD GOVERNANCE

Korupsi menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia. Selain merugikan negara secara finansial, korupsi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan ketimpangan sosial, dan merusak integritas sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara dan organisasi internasional telah memperkenalkan rezim anti-korupsi yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu contoh rezim anti-korupsi yang terkenal adalah Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) yang disetujui pada tahun 2003. UNCAC memberikan kerangka kerja global untuk melawan korupsi dan mendorong kerjasama internasional dalam hal pemberantasan korupsi. Konvensi ini mencakup sejumlah hal, seperti pencegahan korupsi, penegakan hukum, pengembalian aset yang dicuri, dan kerjasama

internasional. Saat ini, UNCAC telah diratifikasi oleh 186 negara di seluruh dunia.

Selain UNCAC, beberapa organisasi internasional juga telah memperkenalkan inisiatif anti-korupsi. Misalnya, Bank Dunia meluncurkan Program Integritas pada tahun 1996 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh bank tersebut. Program ini juga memberikan dukungan teknis dan finansial kepada negara-negara yang ingin meningkatkan sistem integritas mereka.

Selain itu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga telah memperkenalkan Konvensi OECD tentang Pemberantasan Korupsi dalam Transaksi Internasional Bisnis. Konvensi ini mencakup sejumlah hal, seperti pengaturan tanggung jawab perusahaan, pemberantasan suap, dan transparansi dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 44 negara anggota OECD dan oleh negara-negara lain di luar OECD.

Namun, meskipun banyak negara telah menerapkan rezim anti-korupsi, korupsi masih menjadi masalah yang serius di banyak negara di seluruh dunia. Menurut indeks korupsi dari Transparency International, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Indonesia, misalnya, berada di peringkat 102 dari 180 negara pada indeks korupsi tahun 2020. Masalah ini diakui oleh pemerintah Indonesia, yang telah meluncurkan sejumlah inisiatif anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gerakan Nasional Anti-Korupsi (GNAC).

Selain itu, masalah korupsi juga terkait dengan ketimpangan ekonomi dan sosial. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2018, korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan

sosial, sehingga menghambat kemajuan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi adalah kurangnya dukungan politik dari pemerintah, lemahnya sistem hukum dan peradilan, dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi. Selain itu, korupsi juga terkait dengan sejumlah isu global, seperti perdagangan ilegal, pencucian uang, dan kejahatan transnasional lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam memerangi kejahatan transnasional dan mempromosikan tata kelola yang baik.

Dalam hal ini, kerjasama internasional menjadi penting dalam pemberantasan korupsi. Banyak negara telah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain untuk meningkatkan sistem pemberantasan korupsi mereka. Selain itu, kerjasama juga dapat membantu dalam pengembalian aset yang dicuri oleh koruptor dan dalam meningkatkan transparansi dalam transaksi bisnis internasional.

Di Indonesia, misalnya, kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai negara dan organisasi internasional. KPK, misalnya, telah melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris dalam hal pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang dicuri oleh koruptor. Selain itu, KPK juga telah melakukan kerjasama dengan Interpol dalam melacak koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan pemberantasan korupsi, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemerintah harus memberikan dukungan politik yang kuat dan menetapkan undang-undang yang efektif dalam melawan korupsi. Kedua, sistem hukum dan peradilan harus ditingkatkan

dan dibuat lebih efektif dalam mengadili koruptor. Ketiga, partisipasi masyarakat dan organisasi sipil harus didorong dan didukung dalam memerangi korupsi. Keempat, kerjasama internasional harus ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang dicuri oleh koruptor.

Kesimpulannya, korupsi menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara dan organisasi internasional telah memperkenalkan rezim anti-korupsi yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih besar, dan dibutuhkan dukungan politik, partisipasi masyarakat, dan kerjasama internasional yang lebih kuat dalam upaya ini. Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam memerangi kejahatan transnasional dan mempromosikan tata kelola yang baik di seluruh dunia. Untuk pemahaman selanjutnya, silakan baca daftar referensi berikut ini:

1. United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
2. Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2020. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
3. World Bank. (2020). The Worldwide Governance Indicators. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>
4. KPK RI. (2020). Profil KPK. <https://www.kpk.go.id/id/profil-kpk>

5. Santosa, S. (2015). Anti-Corruption and Transparency in Indonesia: Progress and Challenges. *Asian Journal of Comparative Law*, 10(2), 245-264. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2015.17>
6. OECD. (2019). The Anti-Bribery Convention. <https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm>
7. IMF. (2016). Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide. <https://www.imf.org/en/Publications/Training-Manuals/Issues/2016/12/30/Anti-Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-Terrorism-A-Comprehensive-Training-44419>
8. The World Justice Project. (2020). Rule of Law Index 2020. <https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020>
9. UNDP. (2018). Global Anti-Corruption Initiative. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/our-work/global-anti-corruption-initiative.html>
10. European Commission. (2020). Anti-Corruption Policies. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/justice-and-fundamental-rights/corruption/anti-corruption-policies_en

EKONOMI INTERNASIONAL & PERDAGANGAN BEBAS PASCA PERANG DUNIA II



P7

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang paham ekonomi liberal dan praktik perdagangan bebas, lengkap beserta tantangan, dampak negatif, dan juga langkah mitigasinya.

EKONOMI LIBERAL & PERDAGANGAN BEBAS

Ekonomi internasional dan perdagangan bebas telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi internasional dan perdagangan bebas pasca Perang Dunia II, termasuk dampak dan keuntungan dari perdagangan bebas, serta tantangan dan kritik yang dihadapinya.

Pasca Perang Dunia II, ekonomi internasional mengalami perubahan signifikan dengan munculnya organisasi perdagangan multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), GATT, dan IMF. Tujuan utama dari organisasi-organisasi ini adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan yang ada antara negara-negara di seluruh dunia.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perdagangan internasional dan perdagangan bebas pasca Perang Dunia II adalah

liberalisasi perdagangan. Konsep liberalisasi perdagangan adalah prinsip dasar perdagangan bebas, yaitu menghapus hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi perdagangan lainnya yang membatasi akses pasar antara negara-negara.

Dalam konteks ini, perdagangan bebas memberikan keuntungan bagi banyak negara di seluruh dunia. Beberapa keuntungan dari perdagangan bebas adalah:

1. Peningkatan perdagangan internasional: Perdagangan bebas memungkinkan barang dan jasa dapat dijual ke seluruh dunia dengan lebih mudah, meningkatkan perdagangan internasional.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi: Dengan meningkatkan akses pasar, perdagangan bebas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan efisiensi: Melalui perdagangan bebas, negara-negara dapat memaksimalkan keunggulan komparatifnya, memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah dan meningkatkan efisiensi produksi.
4. Peningkatan inovasi: Perdagangan bebas memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi antara negara-negara, yang dapat meningkatkan inovasi dan pengembangan produk baru.

Namun, perdagangan bebas juga dihadapkan pada tantangan dan kritik, terutama dari negara-negara berkembang. Beberapa tantangan dan kritik terhadap perdagangan bebas adalah:

1. Ketidakadilan perdagangan: Negara-negara berkembang merasa bahwa perdagangan bebas memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi negara-negara maju.

2. Ketimpangan perdagangan: Perdagangan bebas dapat memperkuat keunggulan komparatif negara-negara maju dan memperburuk ketimpangan perdagangan.
3. Kerugian ekonomi: Beberapa sektor ekonomi di negara-negara berkembang dapat terluka karena tidak dapat bersaing dengan sektor ekonomi yang kuat di negara-negara maju.
4. Pengabaian isu lingkungan: Perdagangan bebas sering kali mengabaikan isu lingkungan, sehingga menghasilkan dampak negatif pada lingkungan.
5. Terganggunya kebijakan nasional: Perdagangan bebas dapat membatasi kebijakan nasional yang diambil oleh negara-negara, termasuk dalam hal kebijakan lingkungan dan sosial.

Meskipun demikian, perdagangan bebas tetap menjadi solusi yang dianggap efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan perdagangan bebas melalui berbagai kesepakatan perdagangan multilateral seperti Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan Persetujuan Trans-Pacific Partnership (TPP).

Salah satu contoh sukses dari perdagangan bebas adalah Uni Eropa, yang dibentuk pada tahun 1957. Uni Eropa merupakan contoh terbaik tentang bagaimana perdagangan bebas dapat menciptakan keuntungan ekonomi dan meningkatkan perdagangan internasional. Uni Eropa telah membentuk pasar tunggal di seluruh wilayahnya dan menghapuskan hambatan perdagangan antara negara-negara anggota.

Di sisi lain, China menjadi contoh baru tentang bagaimana perdagangan bebas memungkinkan negara berkembang untuk menjadi

kekuatan ekonomi global. China telah melaksanakan kebijakan perdagangan bebas sejak akhir tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu pemasok utama barang-barang konsumen di seluruh dunia.

Dalam era ekonomi internasional saat ini, perdagangan bebas terus menjadi topik yang kontroversial. Meskipun ada keuntungan yang besar dari perdagangan bebas, tantangan dan kritik terhadapnya tetap relevan dan harus diatasi. Kita harus terus memantau perkembangan perdagangan internasional dan membuat kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa perdagangan bebas memberikan keuntungan bagi semua negara di seluruh dunia.

REZIM WTO, KEMUNCULAN FTA & ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

World Trade Organization (WTO) adalah sebuah badan internasional yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi perdagangan internasional antara negara-negara anggota. Berdiri pada tahun 1995, WTO merupakan kelanjutan dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), sebuah perjanjian multilateral yang dibentuk pada tahun 1947.

Pada awalnya, GATT didirikan sebagai respons terhadap kondisi perekonomian dunia pasca Perang Dunia II. Di era tersebut, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat saling memberlakukan tarif impor yang tinggi sebagai upaya untuk melindungi industri mereka dari kompetisi asing. Namun, hal ini berdampak buruk pada perdagangan internasional, sehingga GATT didirikan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut.

GATT berfungsi sebagai perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengurangi tarif impor antar negara anggota. Selain itu, GATT juga memfasilitasi negosiasi untuk mengurangi hambatan perdagangan non-tarif, seperti kuota impor dan regulasi teknis.

Pada tahun 1995, GATT kemudian digantikan oleh WTO, yang memiliki mandat yang lebih luas. Selain mengurangi tarif impor dan hambatan perdagangan non-tarif, WTO juga bertanggung jawab dalam menangani isu-isu perdagangan yang lebih kompleks, seperti perlindungan kekayaan intelektual, subsidi pemerintah, dan penyelesaian sengketa perdagangan antar negara.

Selain perdagangan multilateral yang difasilitasi oleh WTO, muncul pula perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral yang dikenal sebagai Free Trade Agreement (FTA). FTA adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan tarif impor antar negara anggota.

Salah satu contoh FTA yang paling terkenal adalah *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 1994. NAFTA dianggap sebagai salah satu perjanjian perdagangan paling penting di dunia, dan telah memberikan dampak signifikan pada perdagangan dan investasi di Amerika Utara.

Selanjutnya, di Asia Tenggara, muncul *ASEAN Economic Community*. *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah sebuah wilayah ekonomi terpadu yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. AEC menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kawasan ekonomi terpadu di Asia Tenggara dan memperkuat peran ASEAN di tingkat global.

Pada awalnya, ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai forum kerjasama regional antara lima negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan awal ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pada tahun 2003, ASEAN memulai proses untuk membentuk AEC, sebuah kawasan ekonomi terpadu yang terdiri dari

sepuluh negara anggota ASEAN. AEC secara resmi diluncurkan pada tahun 2015 dan diharapkan akan menjadi sebuah kawasan ekonomi terbesar ke-7 di dunia.

Tujuan utama AEC adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing negara-negara anggota ASEAN di tingkat global. AEC bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang bebas dari hambatan perdagangan dan investasi, serta memfasilitasi pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, dan modal di seluruh wilayah ASEAN.

Salah satu tujuan AEC adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara, di mana perusahaan-perusahaan dapat beroperasi dengan lebih mudah dan efisien. AEC juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di luar ASEAN, termasuk dengan negara-negara di Asia Timur, Asia Selatan, dan Pasifik.

AEC dibangun di atas empat pilar utama, yaitu: 1). Pilar ekonomi tunggal: Membentuk pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, yang bebas dari hambatan perdagangan dan investasi; 2). Pilar persaingan yang sehat: Meningkatkan persaingan antara perusahaan-perusahaan di ASEAN dan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual; 3). Pilar integrasi sektor-sektor utama: Meningkatkan integrasi sektor-sektor utama seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan pariwisata di ASEAN; 4). Pilar koneksi orang: Memfasilitasi pergerakan tenaga kerja dan melindungi hak-hak mereka di seluruh wilayah ASEAN.

AEC telah memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota ASEAN, seperti meningkatnya perdagangan intra-ASEAN dan investasi asing langsung ke kawasan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. AEC juga telah mendorong integrasi ekonomi di Asia Tenggara melalui pelaksanaan

kebijakan dan reformasi struktural di negara-negara anggota ASEAN. Hal ini juga membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas di wilayah ini, sehingga dapat memperkuat posisi ASEAN di pasar global.

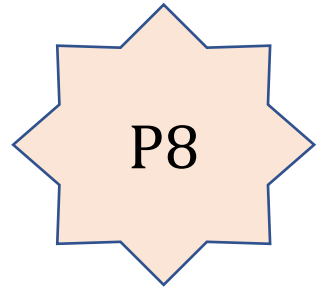
Selain itu, AEC juga memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dan membantu meningkatkan kualitas hidup warga ASEAN melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan AEC, seperti perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi dan struktur industri di negara-negara anggota ASEAN, serta adanya hambatan non-tarif yang masih ada dalam perdagangan antara negara-negara anggota. Beberapa sumber referensi yang relevan yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi internasional dan perdagangan bebas adalah:

1. Krugman, P. (2015). *International economics: theory and policy*. Pearson.
2. Baldwin, R. E. (2016). *The great convergence: information technology and the new globalization*. Harvard University Press.
3. WTO (2021). *World Trade Statistical Review 2021*. World Trade Organization.
4. Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
5. Globalization 101 (2021). *The Benefits and Drawbacks of Free Trade*. Retrieved from <https://www.globalization101.org/the-benefits-and-drawbacks-of-free-trade/>

6. ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint. Diakses dari <https://asean.org/storage/2015/12/ASEAN-Economic-Community-Blueprint.pdf>
7. ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN Integration Report 2021. Diakses dari <https://asean.org/storage/2021/07/AIR2021-Final.pdf>
8. Asian Development Bank. (2017). ASEAN 4.0: What Does the Fourth Industrial Revolution Mean for Regional Economic Integration?. Diakses dari <https://www.adb.org/publications/asean-4-0-fourth-industrial-revolution-mean-regional-economic-integration>
9. World Bank. (2019). ASEAN Economic Community: Progress, Opportunities, and Challenges. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31809>

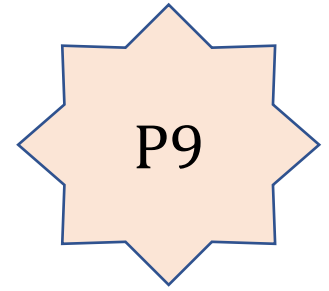
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

ISU EKONOMI INTERNASIONAL: KRISIS FINANSIAL



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang isu ekonomi global, khususnya yang terkait dengan definisi, faktor penyebab dan langkah mitigasi dari krisis finansial.

TANTANGAN KRISIS FINANSIAL

Krisis finansial adalah suatu kondisi dimana sistem keuangan suatu negara atau bahkan dunia mengalami ketidakstabilan yang sangat parah sehingga berdampak pada perekonomian secara luas. Krisis Finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 dan Krisis Eropa pada tahun 2008 adalah dua contoh besar krisis keuangan yang telah terjadi di era modern. Kedua krisis ini memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi global dan mempengaruhi arsitektur ekonomi global yang kita lihat saat ini.

Krisis finansial Asia pada tahun 1997 dimulai di Thailand, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memberikan suku bunga rendah pada sektor riil, tetapi tinggi pada sektor keuangan. Hal ini menyebabkan terjadinya spekulasi di pasar keuangan, sehingga harga saham dan nilai tukar baht Thailand melebihi nilai sebenarnya.

Namun, ketika investor mulai menarik modal mereka dari Thailand, maka harga saham dan nilai tukar baht pun jatuh tajam, dan berdampak pada negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Selama krisis ini, banyak perusahaan besar di Asia yang

mengalami kebangkrutan dan terpaksa mem-PHK sejumlah besar karyawan.

Krisis finansial Eropa pada tahun 2008 dimulai dari Amerika Serikat, ketika krisis perumahan terjadi di negara tersebut dan menyebar ke seluruh dunia. Bank-bank besar di Eropa dan AS terlibat dalam investasi subprime mortgage yang tidak stabil, sehingga ketika pasar perumahan runtuh, bank-bank runtuh. Krisis ini awalnya berpusat pada sektor perbankan di Islandia, tetapi kemudian menyebar ke negara-negara seperti Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, dan Irlandia. Pada puncaknya, krisis ini memuncak pada tahun 2011, ketika banyak negara Eropa mengalami kesulitan membayar hutang mereka dan sistem keuangan Eropa mengalami ketidakstabilan yang signifikan.

Penyebab dari krisis finansial Eropa bervariasi, tetapi beberapa faktor yang memainkan peran penting termasuk terlalu banyak utang, kelebihan investasi di sektor properti, dan kekurangan regulasi dan pengawasan yang memadai. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang kurang efektif juga menjadi faktor yang memperburuk krisis ini.

Krisis finansial yang terjadi di beberapa wilayah di dunia, seperti Asia dan Eropa, memiliki dampak yang signifikan terhadap arsitektur ekonomi global. Krisis finansial bisa mengganggu stabilitas ekonomi global, meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dampak utama dari krisis finansial terhadap arsitektur ekonomi global adalah penurunan pertumbuhan ekonomi global. Selama krisis finansial, kepercayaan investor menurun, mengakibatkan penurunan investasi dan permintaan. Ini berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi global dan dapat memicu resesi ekonomi.

Selain itu, krisis finansial juga memperburuk ketimpangan ekonomi di dunia. Beberapa negara lebih rentan terhadap krisis finansial dibandingkan negara-negara lainnya karena faktor ekonomi dan politik. Dalam beberapa kasus, negara-negara berkembang mengalami dampak yang lebih besar dari krisis finansial karena ketergantungan pada investasi asing dan pasar global yang tidak stabil.

Krisis finansial juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perdagangan global. Selama krisis finansial, permintaan global menurun dan negara-negara mulai menerapkan kebijakan proteksionis. Ini dapat memicu persaingan yang lebih ketat antara negara-negara dan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perdagangan.

Dampak lain dari krisis finansial terhadap arsitektur ekonomi global adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Selama krisis finansial, banyak perusahaan yang gulung tikar atau melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang.

Krisis finansial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa faktor-faktor penyebab krisis finansial, misalnya:

1. Kebijakan Moneter yang Salah. Kebijakan moneter yang salah dapat menjadi faktor penyebab krisis finansial. Kebijakan moneter yang salah bisa berupa suku bunga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Suku bunga yang terlalu rendah akan mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman dan meningkatkan konsumsi, sementara suku bunga yang terlalu tinggi akan membuat pinjaman menjadi mahal dan menurunkan konsumsi. Salah satu contoh krisis finansial akibat

kebijakan moneter yang salah adalah krisis keuangan di Asia pada tahun 1997. Di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia, kebijakan moneter yang salah menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi dan melemahnya nilai tukar mata uang, sehingga banyak investor asing menarik investasinya.

2. Kebijakan Fiskal yang Salah. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang salah juga dapat menyebabkan krisis finansial. Kebijakan fiskal yang salah bisa berupa defisit anggaran yang terlalu tinggi atau pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh krisis finansial akibat kebijakan fiskal yang salah adalah krisis keuangan di Yunani pada tahun 2010. Di Yunani, defisit anggaran yang terlalu tinggi menyebabkan meningkatnya utang pemerintah, sehingga mengancam stabilitas keuangan negara.
3. Spekulasi yang Berlebihan. Spekulasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan krisis finansial. Spekulasi yang berlebihan terjadi ketika investor melakukan investasi dengan mengharapkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh krisis finansial akibat spekulasi yang berlebihan adalah krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2008. Di Amerika Serikat, spekulasi yang berlebihan terjadi pada sektor perumahan, dimana banyak investor melakukan investasi pada sektor ini dengan mengharapkan keuntungan yang besar, sehingga terjadi gelembung harga perumahan yang kemudian meledak dan menimbulkan krisis finansial.
4. Ketidakseimbangan Ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi juga dapat menyebabkan krisis finansial. Ketidakseimbangan ekonomi terjadi ketika terdapat ketimpangan antara produksi dan konsumsi dalam perekonomian suatu negara. Salah satu contoh krisis finansial akibat ketidakseimbangan ekonomi adalah krisis keuangan di

Argentina pada tahun 2001. Di Argentina, terdapat ketimpangan antara produksi dan konsumsi, dimana produksi tidak dapat menjangkau tingkat konsumsi yang tinggi. Akibatnya, terjadi defisit neraca perdagangan dan ketidakmampuan pemerintah untuk membayar utang luar negeri.

5. Krisis di Negara Lain. Krisis di negara lain juga dapat menjadi faktor penyebab krisis finansial di suatu negara. Krisis di negara lain dapat menyebar ke negara-negara lainnya melalui hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Salah satu contoh krisis finansial akibat krisis di negara lain adalah krisis keuangan di Asia pada tahun 1997. Krisis keuangan di Thailand, Filipina, dan Indonesia menyebar ke negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Malaysia.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 telah menyebabkan perubahan yang signifikan pada arsitektur ekonomi global. Krisis tersebut mengungkapkan sejumlah kelemahan dan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi global yang telah ada selama beberapa dekade. Dalam artikel ini, kita akan membahas dampak dari krisis finansial terhadap arsitektur ekonomi global dan bagaimana hal itu mempengaruhi sistem ekonomi global saat ini.

Krisis finansial global pada tahun 2008 dimulai dari pasar hipotek AS yang mengalami kejatuhan. Karena banyak bank dan lembaga keuangan terkait dengan pasar hipotek tersebut, kejatuhan itu menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan terjadinya krisis finansial global. Akibatnya, banyak lembaga keuangan terpaksa bangkrut atau diselamatkan oleh pemerintah. Krisis ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi investor dan pemilik rumah yang kehilangan rumah mereka karena tidak dapat membayar hipotek mereka.

Dampak krisis finansial global yang paling signifikan adalah terjadinya resesi ekonomi global. Negara-negara di seluruh dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Selain itu, dampak krisis ini juga mempengaruhi arsitektur ekonomi global.

Pertama, krisis finansial global memperlihatkan kelemahan dalam sistem keuangan global. Terlalu banyak uang yang beredar di pasar keuangan global yang menyebabkan munculnya gelembung finansial. Ketika gelembung ini pecah, efeknya dapat menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem keuangan global untuk mencegah terjadinya gelembung finansial di masa depan.

Kedua, krisis finansial global mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan ekonomi global dari Barat ke Timur. Selama beberapa dekade terakhir, AS dan Eropa mendominasi ekonomi global. Namun, setelah krisis finansial global, China dan negara-negara Asia lainnya semakin penting dalam arsitektur ekonomi global. Saat ini, China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS.

Ketiga, krisis finansial global menyebabkan munculnya ketidakpercayaan pada lembaga keuangan global. Karena banyak bank dan lembaga keuangan besar yang gagal selama krisis finansial global, masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada sistem keuangan global agar masyarakat dapat mempercayai kembali lembaga keuangan.

Keempat, krisis finansial global juga mengakibatkan meningkatnya regulasi keuangan global. Setelah krisis finansial global, pemerintah di seluruh dunia memperkenalkan regulasi baru untuk menghindari terjadinya krisis finansial di masa depan. Regulasi-regulasi ini termasuk peraturan baru tentang modal minimum yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan, serta kebijakan yang membatasi risiko investasi dan aktivitas keuangan

spekulatif. Regulasi baru ini bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan global dan memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan tidak terlalu terlibat dalam aktivitas keuangan yang berisiko tinggi. Selain itu, ada perubahan regulasi yang signifikan setelah krisis finansial global berupa peningkatan persyaratan modal minimum untuk lembaga keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian dan mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan global. Contohnya, Basel III adalah peraturan baru yang ditetapkan oleh Komite Basel untuk mengatasi risiko perbankan.

Selain peningkatan persyaratan modal minimum, regulasi keuangan global juga mengalami perubahan dalam hal transparansi dan pengawasan. Setelah krisis finansial global, banyak negara mulai memperketat pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas keuangan spekulatif dan risiko tinggi. Contohnya, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act yang diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 2010, bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik dalam sistem keuangan Amerika Serikat.

Dampak lain dari krisis finansial adalah perubahan dalam pola investasi global. Setelah krisis, banyak investor mulai mencari investasi yang lebih aman dan stabil, seperti obligasi pemerintah dan emas. Hal ini mengakibatkan penurunan investasi di sektor yang lebih berisiko seperti saham dan obligasi perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2009, investasi saham global turun sebesar 42%, sedangkan investasi obligasi pemerintah meningkat sebesar 44%.

Kelima, krisis finansial global juga memperlihatkan pentingnya koordinasi ekonomi global. Dalam menghadapi krisis finansial global, negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengatasi krisis

ini. Hal ini termasuk koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah terjadinya resesi global yang lebih dalam.

Dalam menghadapi dampak krisis finansial global, banyak negara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat arsitektur ekonomi global. Salah satu contoh dari langkah-langkah ini adalah peningkatan kerja sama ekonomi regional. Sebagai contoh, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan China telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada tahun 2020, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara dan China. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Asia dan memperkuat arsitektur ekonomi global.

Selain itu, banyak negara juga memperkuat kerja sama dalam hal regulasi keuangan. Pada tahun 2010, G20 (kelompok 20 negara industri dan berkembang terbesar di dunia) menyetujui reformasi keuangan global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko sistemik, dan memperkuat regulasi keuangan global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya krisis finansial global di masa depan.

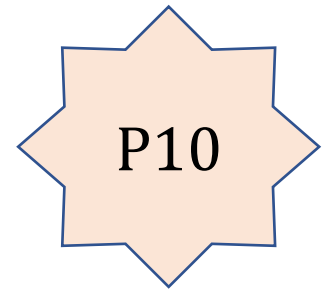
Dalam menghadapi dampak krisis finansial global, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam mengembangkan arsitektur ekonomi global yang lebih kuat dan stabil. Hal ini termasuk memperkuat kerja sama ekonomi regional, meningkatkan regulasi keuangan global, dan memastikan koordinasi kebijakan ekonomi yang lebih baik di seluruh dunia. Dalam jangka panjang, arsitektur ekonomi global yang lebih kuat dan stabil akan dapat mengurangi risiko terjadinya krisis finansial global di masa depan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia.

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya krisis finansial, pemerintah harus melakukan langkah mitigasi yang tepat. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Regulasi. Peningkatan regulasi dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan perekonomian. Pemerintah harus mengatur sistem perbankan, pasar modal, dan asuransi untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan perekonomian tidak terjadi.
2. Kebijakan Moneter dan Fiskal yang Tepat. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya inflasi dan defisit anggaran yang terlalu tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang diambil tidak merugikan perekonomian.
3. Penguatan Sektor Keuangan. Penguatan sektor keuangan dapat membantu mencegah terjadinya krisis finansial. Pemerintah harus memastikan bahwa sektor keuangan stabil dan sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem perbankan, pasar modal, dan asuransi.
4. Peningkatan Kerja Sama Internasional. Peningkatan kerja sama internasional dapat membantu mencegah terjadinya krisis finansial yang menyebar ke negara-negara lain. Pemerintah harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah yang muncul. Untuk lebih jelas, silakan cermati sejumlah materi bacaan berikut ini:

1. Bordo, M.D., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M.S. (2001). Is the crisis problem growing more severe?. *Economic Policy*, 16(32), 51-82.
2. Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996). Bank insolvencies: cross-country experience. Policy Research Working Paper No. 1620. The World Bank.
3. Demirguc-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(7), 1373-1406.
4. Diamond, D.W., & Rajan, R.G. (2011). Fear of fire sales, illiquidity seeking, and credit freezes. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(2), 557-591.
5. Mishkin, F.S. (2001). Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries. NBER Working Paper No. 8087.
6. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2009). Global imbalances and the financial crisis: products of common causes. *Economic Policy*, 24(60), 267-315.
7. Rogoff, K.S. (1999). International institutions for reducing global financial instability. *Journal of Economic Perspectives*, 13(4), 21-42.
8. Stiglitz, J.E. (2003). *Globalization and its discontents*. WW Norton & Company.
9. Wyplosz, C. (1999). International financial crises: causes, prevention, and cures. Policy Research Working Paper No. 2139. The World Bank.

ISU EKONOMI INTERNASIONAL: KERJASAMA MULTILATERAL



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang isu ekonomi global, khususnya yang melibatkan peran-peran kerjasama multilateral.

KERJASAMA EKONOMI MULTILATERAL

Kerjasama ekonomi multilateral adalah sebuah bentuk kerja sama ekonomi antar beberapa negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara anggota kerjasama tersebut. Kerjasama ini melibatkan beberapa negara dan memiliki beberapa bentuk, seperti perdagangan bebas, uni mata uang, dan integrasi ekonomi.

Salah satu contoh kerjasama ekonomi multilateral yang terkenal adalah Uni Eropa (UE). UE didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan menciptakan pasar tunggal di seluruh kawasan Eropa, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan persatuan politik di antara negara-negara anggotanya. Sejak didirikan, UE telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB gabungan lebih dari \$18 triliun pada tahun 2020.

Kerjasama ekonomi multilateral seperti UE telah terbukti efektif dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di antara anggota kerjasama. Berdasarkan data dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perdagangan di antara anggota UE meningkat sebanyak 65% dalam kurun

waktu 10 tahun setelah pembentukannya. Selain itu, anggota UE juga berhasil menciptakan pasar tunggal yang menghilangkan banyak hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi yang berbeda di antara negara-negara anggota.

Selain UE, kerjasama ekonomi multilateral juga dilakukan oleh negara-negara di Asia melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP adalah kerjasama perdagangan bebas yang melibatkan 15 negara di Asia termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal di Asia dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Selain memberikan manfaat ekonomi, kerjasama ekonomi multilateral juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah negara-negara anggota harus mampu menemukan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Negara-negara dengan kepentingan yang berbeda-beda dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda dan sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, beberapa kerjasama ekonomi multilateral juga menghadapi tantangan lain terkait masalah kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dan seringkali sulit untuk menyatukan kepentingan tersebut dalam sebuah kerja sama multilateral. Beberapa negara mungkin lebih tertarik pada keuntungan yang lebih besar, sementara yang lain lebih fokus pada proteksi terhadap industri domestik mereka. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Tantangan selanjutnya adalah terkait perbedaan budaya dan bahasa. Negara-negara yang terlibat dalam kerja sama ekonomi multilateral seringkali memiliki perbedaan budaya dan bahasa yang signifikan. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan mencapai kesepakatan

yang efektif. Bahasa menjadi hal yang penting dalam penyelesaian perjanjian perdagangan internasional karena penafsiran yang berbeda dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan.

Selain itu, perbedaan kekuatan ekonomi antara negara-negara anggota dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja sama ekonomi multilateral. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi cenderung memegang kendali dalam kerja sama ini dan seringkali menentukan agenda yang dijalankan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembagian manfaat kerja sama ekonomi multilateral.

Selain itu, perbedaan kekuatan ekonomi juga dapat memengaruhi mekanisme perdagangan antara negara-negara anggota. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi cenderung memiliki keuntungan dalam perdagangan dan dapat memaksa negara-negara yang lebih lemah untuk menerima persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Hal ini dapat menyebabkan negara-negara yang lebih lemah kehilangan daya saing dan mengalami kerugian dalam perdagangan internasional.

Sebagai contoh, dalam kerja sama ekonomi multilateral yang diwakili oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perbedaan kekuatan ekonomi antara negara-negara anggota telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya negosiasi perdagangan. Negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan agenda dan persyaratan perdagangan, sedangkan negara-negara yang lebih lemah seperti negara-negara berkembang seringkali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Selain itu, perbedaan kekuatan ekonomi juga dapat memengaruhi mekanisme pengambilan keputusan dalam kerja sama ekonomi multilateral. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi keputusan dan agenda yang dijalankan. Hal ini dapat menyebabkan kepentingan negara-negara yang lebih lemah diabaikan dan kerja sama ekonomi multilateral menjadi tidak berjalan dengan baik.

Namun, ada juga beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah dengan mendorong partisipasi aktif dari negara-negara yang lebih lemah dalam kerja sama ekonomi multilateral dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk menyampaikan kepentingan mereka. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing negara-negara yang lebih lemah juga dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam kerja sama ekonomi multilateral.

PERAN G20, WTO & APEC

Organisasi internasional adalah salah satu cara bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. G-20, WTO, dan APEC adalah beberapa contoh organisasi internasional yang berperan penting dalam perdagangan internasional dan kerja sama ekonomi global.

G-20 atau *Group of Twenty* adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Negara-negara anggota G-20 mencakup negara maju dan berkembang, dan mereka bertemu secara berkala untuk membahas masalah ekonomi global dan kerja sama internasional. G-20 didirikan pada tahun 1999 sebagai forum yang lebih inklusif daripada G-7, dan menjadi sangat penting selama krisis finansial global pada tahun 2008.

Tujuan utama G-20 adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh dunia. Selain itu, G-20

juga berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan antara negara anggota, serta mempromosikan reformasi sistem keuangan global.

Sejak didirikan, G-20 telah memainkan peran yang sangat penting dalam menangani krisis ekonomi global, terutama dalam merespons krisis finansial global pada tahun 2008. Melalui kerja sama internasional dan koordinasi kebijakan, G-20 berhasil memulihkan stabilitas keuangan global dan memulai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di seluruh dunia.

Selanjutnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggota. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang didirikan pada tahun 1947.

Tujuan utama WTO adalah untuk mempromosikan perdagangan internasional yang bebas dan adil di seluruh dunia. Organisasi ini bertanggung jawab untuk membantu negara-negara anggota memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan internasional, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.

WTO memiliki peran penting dalam memfasilitasi negosiasi perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa antara negara anggota. Melalui sistem aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO, negara anggota dapat memperoleh akses pasar yang lebih besar dan menjaga hak-hak kekayaan intelektual mereka.

Selanjutnya, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989. APEC terdiri dari 21 negara anggota yang berada di sekitar kawasan Asia-Pasifik, dan mencakup sekitar 60% dari ekonomi dunia.

Tujuan utama APEC adalah untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota dan memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

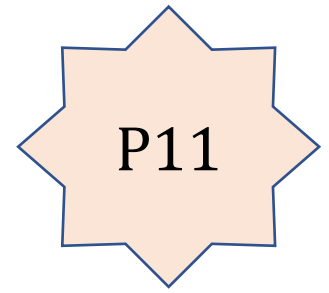
APEC menempatkan perdagangan bebas dan adil sebagai fokus utama, dan berupaya untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan mempromosikan investasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, APEC juga bekerja sama dalam bidang energi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Sejak didirikan, APEC telah memainkan peran yang penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan meningkatkan akses pasar bagi negara-negara anggota. Organisasi ini juga memiliki peran yang penting dalam mempromosikan kerja sama ekonomi global, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks dan berubah-ubah. Untuk selanjutnya, silakan cermati daftar referensi berikut:

1. Baldwin, R. E. (2006). Multilateralising regionalism: spaghetti bowls as building blocks on the path to global free trade. *The World Economy*, 29(11), 1451-1518.
2. Bhagwati, J., & Panagariya, A. (2013). Why free trade agreements are antidemocratic. *Foreign Affairs*, 92(6), 80-91.
3. Dür, A., & Elsig, M. (2011). Principled and pragmatic epistemic communities: The influence of the World Trade Organization on environmental and social standards. *Governance*, 24(4), 635-660.
4. Eichengreen, B. (2005). *Global imbalances and the lessons of Bretton Woods*. MIT Press.

5. Gillard, L. (2010). Managing the politics of protection in the Americas: The role of the Inter-American Development Bank. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 52(1), 109-130.
6. Hoekman, B. M., & Kostecky, M. M. (2009). *The political economy of the world trading system: The WTO and beyond*. Oxford University Press.
7. Kawai, M. (2013). *Regional economic integration in East Asia: challenges and opportunities*. ADBI Working Paper Series, 420.
8. Lee, J. W. (2005). China and the East Asian crisis: learning from the past. *Asian Economic Papers*, 4(1), 1-32.
9. Martin, P., & Messerlin, P. A. (2007). Why is it so difficult? Trade liberalization under the Doha Agenda. *The World Economy*, 30(6), 875-893.

ISU SOSIAL BUDAYA: PERUBAHAN IKLIM



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang isu sosial budaya dan juga ekonomi global, khususnya terkait dengan isu perubahan iklim (*climate change*).

DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendapat perhatian dari banyak pihak dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks politik-ekonomi internasional, kebijakan perubahan iklim dianggap sebagai sebuah upaya kolaboratif dari negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Sejarah kebijakan perubahan iklim diawali dari beberapa konferensi internasional, di mana negara-negara mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam menangani perubahan iklim.

Salah satu konferensi internasional pertama yang membahas tentang perubahan iklim adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi tersebut menghasilkan pembentukan Komisi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian menjadi cikal bakal Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) pada tahun 1992.

Selanjutnya, untuk merespon masalah pemanasan global dan perubahan iklim yang telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling signifikan yang dihadapi dunia saat ini, banyak negara telah bekerja sama dalam berbagai kerangka internasional, seperti Protokol Kyoto, Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Rio+20, dan Program REDD+.

Pada tahun 1997, diadakan Konferensi Perubahan Iklim ke-3 di Kyoto, Jepang, yang menghasilkan Protokol Kyoto. Protokol tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Protokol Kyoto menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990 untuk negara-negara maju. Namun, target tersebut tidak diikuti oleh negara-negara berkembang dan negara-negara seperti Amerika Serikat menolak untuk menandatangani protokol tersebut.

Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada tahun 2005. Protokol ini mengikat negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Protokol Kyoto menetapkan target pengurangan emisi yang harus dicapai oleh negara-negara maju hingga tahun 2012.

Negara-negara maju yang telah menandatangani Protokol Kyoto termasuk Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, dan Uni Eropa. Namun, negara-negara berkembang seperti China, India, dan Brasil tidak diwajibkan untuk membatasi emisi mereka.

Selanjutnya, Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) diselenggarakan sebagai pertemuan dunia yang diadakan pada tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini bertujuan untuk

membahas isu-isu pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan aksi global dalam mengatasi masalah lingkungan.

Hasil utama dari Rio+20 adalah adopsi dokumen berjudul "The Future We Want". Dokumen ini memuat sejumlah komitmen dan rekomendasi, termasuk pembentukan Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan dan penciptaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya, REDD+ dirumuskan sebagai program internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program ini memperbolehkan negara-negara berkembang untuk memperoleh pembayaran dari negara-negara maju yang ingin mengurangi emisi gas rumah kaca mereka melalui kegiatan konservasi hutan.

REDD+ telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan diterapkan di berbagai negara seperti Brasil, Indonesia, dan Kongo. Program ini telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Secara general, Protokol Kyoto, Rio+20, dan REDD+ adalah beberapa kerangka internasional yang telah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengatasi masalah lingkungan, khususnya pemanasan global dan perubahan iklim. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kerangka internasional ini telah memberikan langkah-langkah konkrit dalam menangani masalah lingkungan.

Namun, ada beberapa kritik terhadap kerangka-kerangka ini. Misalnya, Protokol Kyoto telah dikritik karena hanya mencakup negara-negara maju dan tidak mengatur emisi dari negara-negara berkembang yang

semakin memburuk. Selain itu, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah mundur dari perjanjian tersebut, memperlemah upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Rio+20 juga telah dikritik karena tidak menghasilkan tindakan konkret untuk mengatasi masalah lingkungan. Meskipun dokumen "The Future We Want" berisi sejumlah komitmen dan rekomendasi, kebanyakan hanya berupa pernyataan yang bersifat umum dan tidak ada kewajiban konkret bagi negara-negara untuk mengambil tindakan.

Sementara itu, program REDD+ juga menghadapi beberapa kritik. Beberapa orang mengatakan bahwa program ini mendorong privatisasi hutan dan hak-hak masyarakat adat, serta tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam pengelolaan hutan. Meskipun demikian, program ini masih dianggap sebagai salah satu upaya terbaik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam rangka mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik, diperlukan kerja sama global yang kuat dan kerangka internasional yang efektif. Selain itu, negara-negara harus bersedia mengambil tindakan yang konkret dan memprioritaskan lingkungan dalam kebijakan pembangunan mereka.

Selanjutnya, pada tahun 2015, Konferensi Perubahan Iklim ke-21 diadakan di Paris, Prancis, yang menghasilkan Perjanjian Paris. Perjanjian Paris menetapkan target global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius, bahkan berupaya untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius.

Setelah *Paris Agreement* disepakati pada tahun 2015, kebijakan perubahan iklim semakin menjadi fokus utama di dunia politik-ekonomi internasional. Paris Agreement adalah kesepakatan internasional yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dan memperjuangkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu sebesar 1,5

derajat Celsius. Kesepakatan ini juga menekankan pentingnya negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Sejak Paris Agreement disepakati, banyak negara yang telah memperkenalkan kebijakan dan regulasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2019, lebih dari 70 negara telah mengadopsi kebijakan nasional terkait energi bersih dan hampir 50 negara telah menetapkan target pengurangan emisi nol bersih di tahun-tahun mendatang. Negara-negara di seluruh dunia juga mulai mengadopsi teknologi dan inovasi baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti mobil listrik, energi matahari, dan energi angin.

Kebijakan perubahan iklim telah mempengaruhi perdagangan internasional, terutama melalui pengaruhnya terhadap standar lingkungan yang digunakan dalam perjanjian perdagangan internasional. Beberapa negara telah menuntut pengakuan dan perlindungan atas kebijakan lingkungan mereka dalam perjanjian perdagangan, sedangkan negara lain mempertanyakan penggunaan standar lingkungan sebagai alat proteksi perdagangan.

1. Perubahan dalam Investasi Asing. Kebijakan perubahan iklim telah mempengaruhi investasi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa investor telah menarik investasi mereka dari sektor-sektor yang dianggap berisiko, seperti industri fosil dan pertanian. Di sisi lain, sektor energi terbarukan seperti energi matahari dan angin telah menarik investasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
2. Penyusunan Ulang Kebijakan Energi Nasional. Paris Agreement telah mendorong banyak negara untuk memperkenalkan kebijakan baru

dalam sektor energi, termasuk peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Kanada telah mengumumkan rencana untuk menghentikan penggunaan batu bara pada tahun-tahun mendatang.

3. Perubahan dalam Pembangunan Infrastruktur. Kebijakan perubahan iklim telah mempengaruhi pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi. Banyak negara telah memperkenalkan transportasi dengan energi berkelanjutan.

Pada tahun 2019, beberapa negara mengalami kerugian akibat perubahan iklim. Kebakaran hutan di Australia menyebabkan kehilangan 18 juta hektar hutan dan menghabiskan biaya pemulihan sebesar 2 miliar dolar Australia. Banjir di Afrika Timur mengakibatkan 400 ribu orang terdampak dan kerugian ekonomi sebesar 1,5 miliar dolar AS. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya risiko bencana alam dan kerugian ekonomi global, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Dalam politik-ekonomi internasional, implementasi Paris Agreement dapat mempengaruhi hubungan antar negara dan arus perdagangan internasional. Perjanjian tersebut menuntut negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Implementasi kebijakan perubahan iklim dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk di pasar global. Namun, sebaliknya, jika negara-negara maju dan berkembang bersama-sama melaksanakan kebijakan tersebut, maka akan tercipta suatu kesamaan tujuan dan tindakan yang positif dalam menjaga bumi.

Kerjasama antar negara dan sektor ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di era pasca Paris Agreement. Negara-negara maju dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Pada tingkat domestik, beberapa negara seperti Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk mengejar tujuan Paris Agreement dengan mengeluarkan kebijakan dan program-program yang berfokus pada mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa contoh kebijakan tersebut adalah peningkatan penggunaan energi terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan bangunan, dan peningkatan penggunaan teknologi hijau.

Namun, ada juga negara-negara yang belum mengambil tindakan yang cukup dalam mengejar tujuan Paris Agreement, seperti India dan Rusia. Meskipun India telah menetapkan target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, negara tersebut masih sangat bergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sementara itu, Rusia masih sangat bergantung pada ekspor bahan bakar fosil, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan masih sangat lambat.

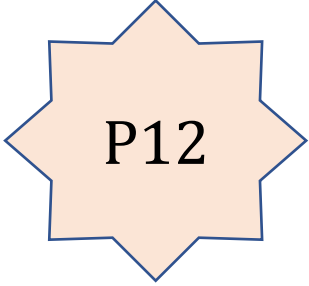
Dalam konteks politik-ekonomi internasional, implementasi *Paris Agreement* dan perubahan kebijakan terkait perubahan iklim telah mengubah dinamika perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki kebijakan dan program yang kuat terkait perubahan iklim dapat menghasilkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, sehingga memberikan keuntungan kompetitif dalam perdagangan global. Sebagai contoh, perusahaan mobil listrik seperti Tesla dan produsen panel surya seperti Jinko Solar telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam

beberapa tahun terakhir, dan kini menjadi pemimpin pasar dalam industri mereka.

Namun, implementasi *Paris Agreement* juga dapat menimbulkan dampak negatif pada sektor ekonomi tertentu, terutama pada sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil. Beberapa contoh sektor yang terkena dampak tersebut adalah industri tambang batu bara, minyak dan gas bumi, serta industri otomotif yang masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan baca referensi sebagai berikut:

1. United Nations. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
2. United Nations Development Programme. (2019). The Paris Agreement: Its Implications for the Development Agenda. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/climate-change/Paris_Agreement_and_development_implications.pdf
3. The World Bank. (2019). The Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31296/9781464813704.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
4. R. Rajan, S. Zingales. (2020). Market Solutions to Climate Change: Financing the Transition to a Low-Carbon Economy. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/ES_20200922_Rajan-Zingales-Market-Solutions-to-Climate-Change-Financing-the-Transition-to-a-Low-Carbon-Economy.pdf
5. International Energy Agency. (2021). Global Energy Review 2021. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021>
6. United Nations Framework Convention on Climate Change. (2021). Nationally Determined Contributions. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs>

ISU SOSIAL BUDAYA: DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA (HAM)



P12

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang sejarah perkembangan demokrasi dan HAM pasca Perang Dunia II.

DEMOKRASI & HAM PASCA PERANG DUNUA II

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua hal yang erat terkait dan keduanya memiliki sejarah yang panjang setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan besar dalam tata kelola politik dunia. Dalam Konferensi San Francisco pada tahun 1945, 51 negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan utama mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional. Salah satu prinsip dasar PBB adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Sejak saat itu, banyak negara yang beralih dari bentuk pemerintahan otoriter ke demokrasi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, terjadi demokratisasi di banyak negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di Eropa, demokratisasi terjadi di sebagian besar negara setelah jatuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Selama periode ini, hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam dunia politik internasional. Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi hak-hak dasar yang harus diakui oleh semua negara. Namun, hanya beberapa negara yang benar-benar menerapkan hak-hak ini dalam praktiknya.

Pada tahun 1966, PBB mengeluarkan dua perjanjian internasional tentang hak asasi manusia: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). ICCPR menjamin hak-hak seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, sedangkan ICESCR menjamin hak-hak seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, upaya untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional terus dihadapkan dengan tantangan dan kegagalan. Misalnya, banyak negara tidak menghormati hak asasi manusia dalam praktiknya, dan hak-hak ini sering kali diabaikan dalam situasi darurat atau konflik bersenjata. Selain itu, PBB seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di sisi lain, demokrasi juga menghadapi tantangan dan perubahan dalam perkembangannya. Meskipun banyak negara telah beralih ke demokrasi, demokrasi juga mengalami krisis di banyak negara. Terutama pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak negara berkembang yang beralih dari bentuk pemerintahan militer ke demokrasi, tetapi pada akhirnya mengalami kegagalan dalam membangun sistem politik yang stabil dan efektif.

Dalam konteks ini, sejarah perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) pasca Perang Dingin adalah sebuah kisah yang panjang dan kompleks. Setelah Perang Dunia II dan kekalahan Nazi Jerman, negara-

negara Barat mulai mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagai landasan dari tatanan internasional yang baru. Namun, proses ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan konflik yang terjadi di seluruh dunia, dan sejumlah krisis besar, seperti Perang Dingin dan Perang di Timur Tengah, telah mempengaruhi perkembangan demokrasi dan HAM secara signifikan.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Barat mulai mempromosikan demokrasi sebagai prinsip yang mendasari tatanan internasional yang baru. Ini terutama disebabkan oleh kegagalan negara-negara seperti Jerman dan Italia untuk mengadopsi sistem politik yang stabil dan demokratis selama antara perang, yang berkontribusi pada naiknya pemerintahan otoriter dan terjadinya Perang Dunia II. Dalam kerangka inilah, demokrasi dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perang di masa depan.

Pada tahun 1947, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut Doktrin Truman, yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami tekanan dari negara-negara komunis. Doktrin ini menjadi dasar bagi Program Marshall, sebuah program bantuan ekonomi besar-besaran yang ditujukan untuk membantu negara-negara Eropa pasca-perang dalam membangun kembali ekonomi mereka. Program ini menjadi salah satu faktor yang membantu memperkuat institusi demokrasi di Eropa pasca-perang.

Selama tahun 1950-an dan 1960-an, demokrasi mulai tersebar ke seluruh dunia. Negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka mulai mengadopsi sistem politik demokratis sebagai hasil dari gerakan kemerdekaan nasional. Setelah Perang Dunia II, kekuatan besar yang terlibat dalam perang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. PBB juga mencoba untuk memajukan demokrasi dan HAM di seluruh dunia. Di Eropa, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dibentuk pada

tahun 1960-an dan mencoba mempromosikan demokrasi dan HAM di seluruh benua.

Pada tahun 1980-an, demokrasi mulai merebak di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Asia Timur, dan Eropa Timur. Dalam beberapa kasus, transisi ke demokrasi terjadi secara damai, seperti di Portugal, Spanyol, dan Chili. Di negara lain, seperti Filipina, transisi ke demokrasi diwarnai dengan kekerasan dan konflik, namun pada akhirnya berhasil.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet berusaha untuk mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik mereka. Negara-negara ini termasuk Rusia, Ukraina, Georgia, dan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Namun, transisi ke demokrasi tidak selalu lancar. Di beberapa negara, seperti Zimbabwe dan Myanmar, transisi ke demokrasi terhambat oleh korupsi, kekerasan politik, dan ketidakstabilan ekonomi. Bahkan di negara-negara yang sudah menjadi demokrasi, terdapat tantangan dalam mempertahankan demokrasi mereka, seperti terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat pada masa sekarang.

Selanjutnya, terkait dengan perkembangan HAM setelah Perang Dingin, dunia mengalami perubahan besar. Sejak didirikan pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi dasar bagi pengembangan HAM di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia mengalami perubahan besar dalam hubungan internasional. Perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memicu kompetisi global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam hal hak asasi manusia (HAM), perang dingin memiliki dampak besar pada peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Setelah perang dunia kedua, PBB didirikan pada tahun 1945 dan menyatakan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 memperkuat komitmen ini. DUHAM menyatakan bahwa semua orang lahir merdeka dan setara dalam martabat dan hak, serta menegaskan hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

Dalam beberapa dekade setelah perang dunia kedua, banyak negara melakukan reformasi konstitusional untuk memasukkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Namun, pelaksanaan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan besar di seluruh dunia. Perang dingin memicu keterlibatan besar-besaran dari negara-negara besar dalam upaya melindungi hak asasi manusia, tetapi seringkali upaya ini dilakukan dengan motivasi politik atau ekonomi yang tersembunyi. Dalam beberapa kasus, perlindungan hak asasi manusia juga digunakan sebagai alasan untuk intervensi militer oleh negara-negara besar.

Perkembangan hak asasi manusia pasca perang dingin juga telah diwarnai dengan berbagai konflik internasional dan perang saudara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Konflik di Rwanda pada tahun 1994, misalnya, mengakibatkan pembantaian massal terhadap kelompok etnis Tutsi oleh kelompok etnis Hutu, sementara komunitas internasional terlambat merespons.

Perkembangan teknologi dan informasi juga memainkan peran penting dalam peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, media sosial dan teknologi digital

telah memberikan platform untuk pengorganisasian massa dan aktivisme online, memungkinkan aktivis hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan bekerja bersama-sama di seluruh dunia.

Namun, upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Terlepas dari kemajuan teknologi dan informasi, banyak negara masih menahan dan menindas orang-orang yang melakukan kritik atau melakukan aktivitas politik yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim politik.

Beberapa negara juga masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk diskriminasi rasial, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan pembatasan kebebasan beragama atau berbicara.

Di sisi lain, beberapa organisasi hak asasi manusia telah berhasil mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia dengan melobi pemerintah, mengadvokasi hak asasi manusia di forum internasional, dan memberikan bantuan hukum dan pendidikan tentang hak asasi manusia.

Salah satu organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia adalah Amnesty International, yang didirikan pada tahun 1961 dan memiliki lebih dari tujuh juta anggota di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki fokus khusus pada melindungi hak asasi manusia bagi mereka yang ditahan atau dihukum tanpa pengadilan, serta mereka yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan.

Organisasi lain seperti Human Rights Watch dan Freedom House juga memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Human Rights Watch menyediakan laporan tahunan tentang situasi hak asasi manusia di seluruh dunia, sementara Freedom House melacak perkembangan demokrasi di seluruh dunia dan mengeluarkan laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan politik.

Di Indonesia, perkembangan hak asasi manusia terus berkembang sejak reformasi pada tahun 1998. Pada tahun 1999, Indonesia menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 dan telah memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi nasional.

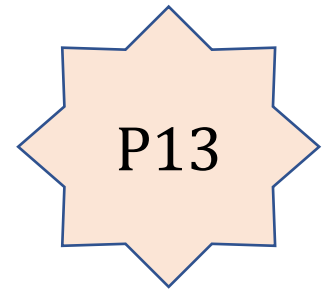
Meskipun demikian, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di negara-negara otoriter, termasuk di Indonesia di bawah pemerintahan pemerintahan Soeharto. Terjadi cukup banyak kasus-kasus pelecehan seksual, diskriminasi rasial, dan pembatasan kebebasan berbicara. Organisasi-organisasi seperti KontraS dan LBH Jakarta terus memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia, dengan memantau situasi hak asasi manusia dan menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak tahun 2015. Sebagai anggota dewan ini, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia dan bekerja sama dengan negara lain dalam upaya memajukan perlindungan hak asasi manusia di dunia.

Perkembangan hak asasi manusia pasca perang dingin menunjukkan bahwa kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip yang semakin dihargai oleh masyarakat global. Namun, tantangan besar masih ada di hadapan kita dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Penting bagi kita semua untuk tetap memperjuangkan hak asasi manusia dan mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara. Selanjutnya, silakan cermati referensi bacaan berikut ini:

1. Diamond, L. (2010). The democratic revolution. *Foreign Affairs*, 89(2), 32-47.
2. Bienen, H. (2007). Understanding the post-Cold War democracies. *Journal of Democracy*, 18(1), 166-178.
3. Amnesty International. (2021). Human rights in the world. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/human-rights-in-the-world/>
4. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>
5. Huntington, S. P. (1991). *The third wave: democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
6. Fukuyama, F. (1989). The end of history?. *The National Interest*, 16, 3-18.
7. Kurlantzick, J. (2015). *Democracy in retreat: the revolt of the middle class and the worldwide decline of representative government*. Yale University Press.
8. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
9. Human Rights Watch. (2021). *World Report 2021: Rights Trends in the Covid-19 Era*. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2021>
10. Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.

ISU EKONOMI INTERNASIONAL: INTERNATIONAL DEVELOPMENT



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang isu pembangunan internasional, termasuk mengenai Kontroversi Dana Bantuan Internasional, Agensi Pembangunan Internasional dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

KONTROVERSI DANA BANTUAN INTERNASIONAL, AGENSI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL & KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

Dana bantuan internasional, agensi pembangunan internasional, dan kerja sama pembangunan internasional seringkali menjadi topik yang kontroversial. Sementara beberapa orang percaya bahwa dana bantuan internasional dan agensi pembangunan internasional dapat membantu negara-negara berkembang dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, yang lain mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya.

Dana bantuan internasional adalah bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Bantuan ini dapat berupa bantuan keuangan atau bantuan dalam bentuk barang atau jasa. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu negara-negara berkembang, dana bantuan internasional seringkali menjadi

kontroversial. Salah satu kontroversi yang paling sering terjadi adalah bahwa bantuan tersebut mungkin tidak efektif atau tidak membantu memperbaiki masalah yang ada di negara tersebut.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa bantuan tersebut dapat memperlemah negara-negara penerima dan membuat mereka tergantung pada bantuan dari negara-negara maju. Selain itu, bantuan tersebut seringkali memiliki syarat tertentu, seperti pengurangan pengeluaran pemerintah di sektor-sektor tertentu atau reformasi kebijakan ekonomi. Hal ini dapat mengarah pada pemotongan anggaran publik di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya ditingkatkan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Agensi pembangunan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, juga seringkali menjadi kontroversial. Agensi-agensi ini memiliki kebijakan yang cenderung didasarkan pada ideologi neoliberal, yaitu bahwa pasar bebas dan privatisasi dapat memperbaiki ekonomi dan masyarakat. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini tidak efektif dan bahkan dapat merusak lingkungan dan menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih besar.

Selain itu, agensi pembangunan internasional seringkali dituduh tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas yang cukup. Beberapa proyek pembangunan yang didanai oleh agensi ini dikritik karena tidak konsultatif dan tidak memperhitungkan pandangan masyarakat setempat. Ada juga kekhawatiran bahwa agensi ini memperkuat hegemoni negara-negara maju dan memaksakan kebijakan mereka pada negara-negara berkembang.

Kerjasama pembangunan internasional seringkali dianggap sebagai cara yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam membantu negara-negara berkembang daripada memberikan dana bantuan langsung. Kerjasama ini

dapat berupa pengalihan teknologi, transfer pengetahuan, dan kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan.

Namun, kerjasama pembangunan internasional juga dapat menjadi kontroversial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kerjasama tersebut dapat membuka pintu bagi eksploitasi dan penjajahan oleh negara-negara maju. Mereka juga mempertanyakan sejauh mana kerjasama tersebut adil dan menghormati kepentingan dan pandangan masyarakat setempat.

Meskipun kontroversi-kontroversi ini ada, penting untuk diingat bahwa dana bantuan internasional, agensi pembangunan internasional, dan kerjasama pembangunan internasional dapat memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang jika dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. Ada beberapa contoh proyek pembangunan internasional yang berhasil memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang.

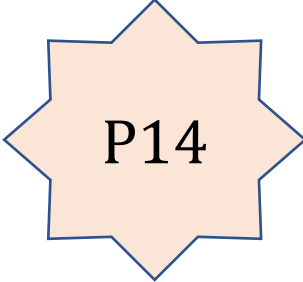
Salah satu contoh proyek yang berhasil adalah proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki manajemen hutan di negara-negara berkembang. Melalui kerjasama antara negara-negara maju dan berkembang, proyek ini telah berhasil memperbaiki manajemen hutan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Kesimpulannya, dana bantuan internasional, agensi pembangunan internasional, dan kerjasama pembangunan internasional seringkali menjadi topik yang kontroversial. Namun, jika dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel, mereka dapat memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki praktik-praktik yang terlibat dalam kerjasama pembangunan

internasional sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, bisa dibaca daftar referensi ini:

1. Easterly, W. (2006). *The white man's burden: Why the West's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good*. Penguin Books.
2. Ghani, E., & Lockhart, C. (2018). The objective of foreign aid. In *The Oxford Handbook of Africa and Economics* (Vol. 2, pp. 435-459). Oxford University Press.
3. Global Affairs Canada. (2021). International development. <https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/developing-countries-pays-en-developpement/index.aspx?lang=eng>
4. REDD+ Partnership. (2021). About REDD+. <https://theredddesk.org/about-redd>
5. United Nations Development Programme. (2021). About UNDP. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us/about-undp.html>
6. World Bank. (2021). International development. <https://www.worldbank.org/en/topic/development>

ISU SOSIAL-BUDAYA: *IDENTITY, NATIONALISM & ETHNIC CONFLICTS*



P14

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang *Citizenship, State vs Nation, Identity and Politics*.

KEWARGANEGARAAN, NASIONALISME & POLITIK IDENTITAS

Konsep kewarganegaraan, nasionalisme, dan politik identitas seringkali menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam politik. Artikel ini akan membahas definisi dari ketiga konsep tersebut serta mengeksplorasi bagaimana mereka memengaruhi politik dan masyarakat.

Kewarganegaraan merujuk pada status hukum dan politik seseorang dalam suatu negara. Kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban seseorang di dalam negara tersebut, seperti hak memilih, hak mendapatkan layanan publik, dan kewajiban membayar pajak. Kewarganegaraan juga dapat menentukan akses seseorang ke hak-hak internasional, seperti hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Kewarganegaraan adalah sebuah status hukum yang menunjukkan keterikatan individu pada sebuah negara. Status ini memberikan hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara dalam negara tersebut. Model kewarganegaraan yang berbeda dapat memiliki implikasi yang berbeda bagi hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana hak-hak dan kewajiban

tersebut diimplementasikan dan diatur. Berikut adalah beberapa jenis model kewarganegaraan yang ada:

1. Model Jus Soli. Jus soli adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kewarganegaraan pada negara tempat ia dilahirkan. Ini berarti, orang yang lahir di negara tertentu secara otomatis menjadi warga negara dari negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan orang tua mereka. Model ini banyak diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara di Amerika Latin.
2. Model Jus Sanguinis. Jus sanguinis adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua. Dalam model ini, orang yang lahir dari orang tua warga negara suatu negara secara otomatis memiliki kewarganegaraan yang sama dengan orang tua mereka. Model ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Italia, dan Belanda.
3. Model Kombinasi. Model kombinasi adalah sebuah model kewarganegaraan yang memadukan konsep jus soli dan jus sanguinis. Dalam model ini, kewarganegaraan dapat diberikan baik berdasarkan tempat kelahiran maupun kewarganegaraan orang tua. Model ini diterapkan di beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, dan India.
4. Model Investasi. Model investasi adalah sebuah model kewarganegaraan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan melalui investasi dalam ekonomi negara tersebut. Model ini diterapkan di beberapa negara seperti Antigua dan Barbuda, St. Kitts dan Nevis, dan Grenada.

5. Model Naturalisasi. Model naturalisasi adalah sebuah model kewarganegaraan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan setelah tinggal atau bekerja dalam sebuah negara selama periode waktu yang ditentukan, biasanya beberapa tahun. Model ini diterapkan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
6. Penerapan jenis model kewarganegaraan tertentu dapat berdampak pada perspektif politik, sosial, dan budaya dari individu dan negara itu sendiri. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada mempraktikkan model jus soli, yang mendorong integrasi dan penerimaan multikulturalisme dengan menekankan pada hak dan kewajiban yang setara untuk semua warga negara. Namun, ada juga negara-negara yang lebih memprioritaskan kewarganegaraan berdasarkan darah, seperti Jerman dan Jepang, yang dapat menciptakan eksklusivitas kewarganegaraannya.
7. Model Kewarganegaraan Hibrida. Model kewarganegaraan hibrida adalah gabungan antara model kewarganegaraan jus sanguinis dan jus soli. Model ini diterapkan di beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru. Di Australia, anak yang lahir di dalam negeri dan memiliki orang tua yang menjadi warga negara Australia, maka anak tersebut akan menjadi warga negara Australia secara otomatis. Namun, jika anak tersebut lahir di luar negeri namun memiliki orang tua yang menjadi warga negara Australia, maka anak tersebut harus mengikuti prosedur tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia.
8. Model Kewarganegaraan Investasi. Model kewarganegaraan investasi, juga dikenal sebagai program kebijakan visa emas, memungkinkan individu yang berinvestasi dalam proyek-proyek tertentu di suatu

negara, mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut. Model ini diterapkan di beberapa negara seperti Siprus, Malta, dan Amerika Serikat. Dalam program ini, individu harus berinvestasi dalam proyek tertentu seperti pembangunan hotel, perumahan atau proyek lainnya dengan jumlah minimum investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Setelah itu, individu tersebut dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan negara tersebut.

9. Model Kewarganegaraan Digital. Model kewarganegaraan digital adalah model yang relatif baru dan masih dalam tahap eksperimen. Model ini memungkinkan individu untuk memiliki kewarganegaraan digital yang diakui secara global dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Sebuah perusahaan teknologi bernama Estonia, telah mengembangkan model ini dan memberikan kewarganegaraan digital kepada warga negaranya. Namun, model ini masih sangat kontroversial dan masih banyak diperdebatkan tentang efektivitas dan keamanannya.

Dengan demikian, model kewarganegaraan yang diterapkan di setiap negara sangat beragam dan mungkin memiliki perbedaan signifikan dalam hal hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negaranya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami model kewarganegaraan yang diterapkan di negara mereka atau negara yang mereka ingin tinggali. Pemahaman ini akan membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana mereka dapat menjadi warga negara suatu negara dan hak serta kewajiban yang akan mereka miliki setelah menjadi warga negara. Selain itu, pemahaman tentang model kewarganegaraan juga penting untuk memahami isu-isu seperti migrasi dan hak asasi manusia di tingkat global.

Sementara itu, nasionalisme merupakan keyakinan bahwa sebuah negara harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok lain. Nasionalisme dapat menjadi positif jika digunakan sebagai cara untuk mempersatukan masyarakat dengan menekankan persamaan dan kesetiaan pada negara. Namun, nasionalisme juga dapat menjadi negatif jika digunakan sebagai alasan untuk menindas atau menghilangkan kelompok minoritas.

Politik identitas berkaitan dengan cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana identitas tersebut dipengaruhi oleh politik. Politik identitas dapat membentuk kelompok-kelompok politik yang berdasarkan pada identitas sosial, seperti suku, agama, atau orientasi seksual. Kelompok-kelompok ini kemudian memperjuangkan hak-hak mereka dan dapat berkonflik dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Konsep-konsep ini seringkali menjadi bahan perdebatan dalam politik dan masyarakat, terutama dalam konteks globalisasi dan migrasi. Ada beberapa contoh konflik yang muncul karena perbedaan pandangan tentang kewarganegaraan, nasionalisme, dan politik identitas, seperti krisis migrasi dan konflik antara negara-negara yang terlibat dalam isu-isu perbatasan.

Namun, penting untuk diingat bahwa kewarganegaraan, nasionalisme, dan politik identitas dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat jika digunakan dengan bijak. Mereka dapat membantu mempersatukan masyarakat dalam satu tujuan dan memberikan identitas yang kuat bagi individu dan kelompok.

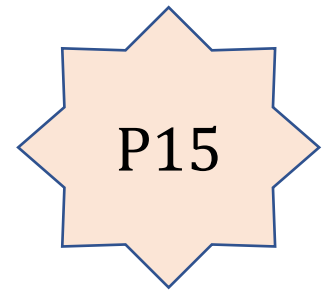
Salah satu contoh positif dari penggunaan nasionalisme adalah di negara-negara seperti Singapura dan Jepang. Di Singapura, nasionalisme dipromosikan sebagai cara untuk mempersatukan masyarakat multikultural dalam satu negara yang kuat dan stabil. Di Jepang, nasionalisme dipandang

sebagai cara untuk mempromosikan nilai-nilai tradisional dan mendorong inovasi dan kemajuan teknologi.

Kesimpulannya, kewarganegaraan, nasionalisme, dan politik identitas adalah konsep-konsep yang kompleks dan kontroversial dalam politik dan masyarakat. Namun, jika digunakan dengan bijak, konsep-konsep ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat dalam mempersatukan individu dan kelompok dalam satu tujuan. Untuk selanjutnya, silakan baca materi referensi berikut ini:

1. Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
2. Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
3. Hall, S. (1992). The Question of Cultural Identity. In S. Hall, D. Held & T. McGrew (Eds.), *Modernity and Its Futures* (pp. 273-316). Cambridge: Polity Press.
4. Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press.
5. Smith, A. D. (1991). *National Identity*. Reno: University of Nevada Press.
6. Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 25-73). Princeton: Princeton University Press.

TANTANGAN KEAMANAN & EKONOMI-POLITIK INTERNASIONAL MASA DEPAN



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa tentang tantangan keamanan & politik internasional masa depan.

TANTANGAN KEAMANAN & POLITIK INTERNASIONAL MASA DEPAN

Tantangan keamanan dan politik internasional terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan pergeseran dalam politik internasional, baik dalam hal kebijakan keamanan, kerjasama internasional, maupun konflik yang terjadi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, ada cukup banyak tantangan yang berpotensi faktor yang mempengaruhi keamanan dan ekonomi-politik internasional masa depan, yang dapat dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia.

1. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi tantangan dalam politik internasional. Teknologi seperti kecerdasan buatan, senjata nuklir, dan senjata biologis dapat digunakan sebagai alat keamanan. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah merevolusi dunia dalam banyak hal, termasuk cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan

melakukan perang. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru bagi keamanan dan politik internasional, yang akan terus membentuk dunia di masa depan.

Salah satu tantangan terbesar yang ditimbulkan oleh teknologi adalah potensi serangan siber. Seiring negara-negara semakin bergantung pada sistem digital untuk infrastruktur kritis dan komunikasi, ancaman serangan siber semakin serius. Serangan ini dapat menargetkan segala hal mulai dari institusi pemerintah hingga perusahaan swasta, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur fisik dan kekayaan intelektual.

Selain itu, perkembangan teknologi militer canggih seperti drone dan sistem senjata otonom memiliki potensi untuk merevolusi peperangan. Meskipun teknologi ini dapat memberikan keuntungan signifikan dalam pertempuran, mereka juga menimbulkan kekhawatiran etis tentang penggunaan kekuatan dan potensi untuk menghilangkan kendali.

Selain tantangan dalam hal keamanan, teknologi juga mempengaruhi politik internasional. Media sosial dan internet telah memberikan platform untuk komunikasi dan aktivisme politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memungkinkan penyebaran propaganda dan desinformasi secara cepat dan mudah.

Lebih lanjut, teknologi juga dapat memengaruhi perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antarnegara. Inovasi dalam logistik dan manufaktur telah mengubah cara produk diproduksi, dikirim, dan dijual di seluruh dunia. Namun, ini juga dapat menciptakan kesenjangan antara negara-negara yang memiliki akses ke teknologi terbaru dan mereka yang tidak.

Selain tantangan ini, ada beberapa perdebatan tentang regulasi teknologi dan hak privasi yang mempengaruhi politik internasional. Contohnya, beberapa negara telah menuntut perusahaan teknologi besar

seperti Facebook dan Google untuk memenuhi persyaratan privasi yang lebih ketat, sementara perusahaan ini sendiri telah melobi pemerintah untuk mengizinkan praktik pengumpulan data mereka.

Tantangan teknologi ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang. Kemajuan teknologi dapat membantu negara-negara berkembang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara mereka dan negara-negara maju.

Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama internasional dan regulasi yang efektif sangat diperlukan. Ada beberapa inisiatif internasional yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti Konvensi Dunia tentang Komunikasi Internasional dan Telekomunikasi (WCIT) dan Konvensi tentang Kejahatan Siber. Selain itu, perusahaan teknologi besar juga telah diatur lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Selain itu, teknologi juga memiliki dampak pada konflik antar negara. Perang siber menjadi semakin umum dalam bentuk serangan siber yang dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu untuk mencuri data rahasia, merusak infrastruktur, atau mengacaukan sistem komunikasi. Contohnya adalah serangan siber yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2014, yang membuat negara tersebut mengalami gangguan pada sistem komunikasi, listrik, dan perbankan.

Di sisi lain, teknologi juga membawa dampak positif dalam bidang keamanan dan politik internasional. Teknologi dapat membantu meningkatkan keamanan dan membuka peluang untuk kerja sama antarnegara. Contohnya adalah penggunaan teknologi satelit untuk memonitor pergerakan kapal di laut dan mencegah illegal fishing atau tindak

kejahatan di perairan internasional. Selain itu, teknologi juga dapat membantu dalam upaya penyelesaian konflik melalui penggunaan media sosial untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai.

Namun demikian, tantangan keamanan dan politik internasional yang muncul dari perkembangan teknologi memerlukan kerja sama yang erat antar negara. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi dan teknologi, serta pembentukan aturan yang jelas dan efektif dalam penggunaan teknologi. Selain itu, negara juga perlu memperkuat kemampuan mereka dalam melindungi diri dari serangan siber dan mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk keamanan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ini, PBB telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan keamanan dan politik yang muncul dari perkembangan teknologi. PBB telah membentuk berbagai forum dan badan internasional untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi dan keamanan. Selain itu, beberapa negara juga telah membentuk kesepakatan dan kerja sama bilateral atau multilateral dalam bidang teknologi dan keamanan, seperti antara Amerika Serikat dan Jepang dalam bidang *cybersecurity*.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membawa banyak tantangan keamanan dan politik internasional yang memerlukan perhatian serius dari negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara perlu bekerja sama dan mengembangkan aturan yang efektif dalam penggunaan teknologi untuk keamanan dan kesejahteraan bersama. Hal ini juga memerlukan kemampuan yang kuat dalam melindungi diri dari serangan siber dan mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan kerja sama dan upaya bersama, tantangan keamanan dan

politik internasional dapat diatasi dan teknologi dapat menjadi kekuatan yang positif dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di seluruh dunia.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam keamanan dan politik internasional di abad ke-21. Pemanasan global, peningkatan suhu laut, kekeringan, dan bencana alam terkait lainnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan memengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi isu penting dalam kebijakan keamanan internasional, dan banyak negara telah memperkuat kebijakan mereka dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

3. Konflik Internasional

Konflik internasional tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam politik internasional. Beberapa konflik besar yang terjadi saat ini termasuk konflik Israel-Palestina, perang saudara di Suriah, dan perang di Afghanistan. Konflik-konflik ini dapat mempengaruhi keamanan global, mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini dan mencegah terjadinya konflik baru akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia.

4. Migrasi dan Pengungsi

Migrasi dan pengungsi telah menjadi masalah yang semakin kompleks dalam keamanan dan politik internasional. Jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka karena konflik, perubahan iklim, dan kemiskinan. Kondisi

hidup yang buruk bagi migran dan pengungsi dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, kerusuhan, dan konflik yang lebih besar. Selain itu, munculnya sentimen anti-imigran di beberapa negara dapat memperumit situasi ini dan memperburuk keamanan internasional.

5. Terorisme

Terorisme merupakan ancaman keamanan global yang terus meningkat. Serangan terorisme yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang besar terhadap keamanan nasional dan internasional. Serangan teroris telah mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Organisasi teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram masih aktif dan berusaha untuk memperluas pengaruh mereka ke seluruh dunia. Mereka menggunakan teknologi dan media sosial untuk merekrut anggota dan menyebarkan propaganda mereka. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah terorisme dengan meningkatkan keamanan dan intelijen, melindungi batas-batas nasional, dan memerangi organisasi teroris dengan cara yang efektif.

6. *Cyberwarfare*

Cyberwarfare adalah ancaman keamanan global yang semakin meningkat. Negara-negara dan organisasi teroris semakin menggunakan teknologi digital untuk merusak infrastruktur, mencuri data, dan melancarkan serangan siber. Serangan siber dapat memengaruhi keamanan nasional dan internasional, ekonomi, dan masyarakat secara umum. Untuk mengatasi ancaman ini, negara-negara harus meningkatkan keamanan siber dan melindungi infrastruktur kritis mereka. Selain itu, diperlukan kerja sama

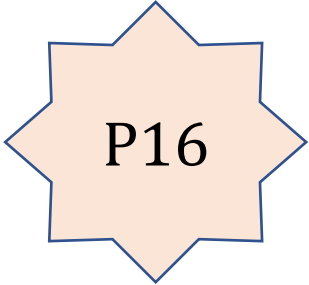
internasional untuk mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi digital dan cyberwarfare.

7. Perang Dagang

Perang dagang antara negara-negara dapat mempengaruhi ekonomi dan politik secara signifikan. Perang dagang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, mempengaruhi pasar saham, dan memicu ketidakstabilan politik. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, misalnya, mempengaruhi pasar global dan memicu ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Negara-negara harus menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan dagang mereka dengan cara yang damai dan menghindari konflik yang lebih besar.

1. Winarno, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014
2. Erendor, Mehmet Emin & Mehmet Fatih Oztarsu. *Contemporary Issues in International Relations: Problem of International Community*. UK: Cambridge Scholars Publishing. 2020. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Contemporary_Issues_in_International_Rel/RPXVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
3. Attina, Fulvio. 2020. "International Relations and Contemporary World Issues". *International Relations*. Vol.II. 2019. Available: <https://www.eolss.net/sample-chapters/c14/E1-35-03.pdf>
4. "Global Security Report 2020" Trustwave, accessed on 3 February 2022, <https://www.trustwave.com/en-us/resources/library/documents/global-security-report-2020/>

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)



P16

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga akan diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang isu-isu keamanan, ekonomi dan politik internasional, dan dampaknya terhadap stabilitas dan instabilitas masyarakat global di masa mendatang.